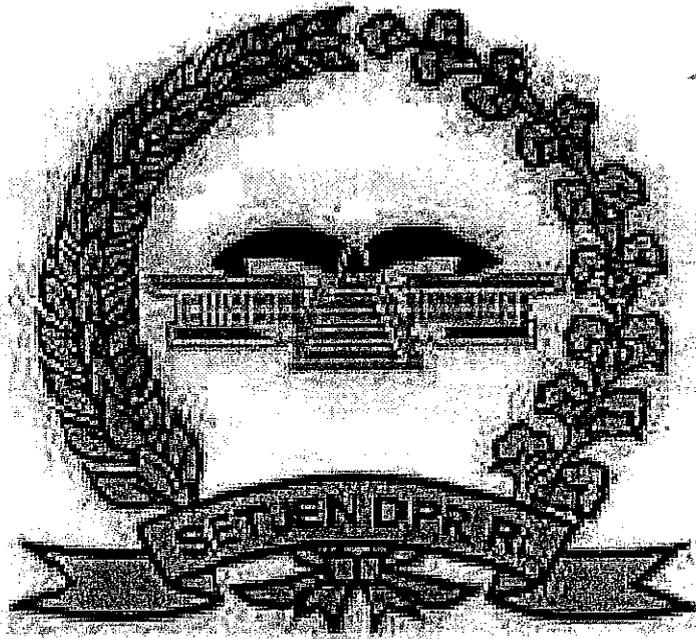


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
(002)**



**LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2016
*Audited***

JL. JEND. GATOT SUBROTO, JAKARTA

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 25 April 2017
Pengguna Anggaran


Achmad Djuned, S.H., M.Hum
NIP. 19570911 198403 1 002



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 Audited sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 25 April 2017
Pengguna Anggaran


Achmad Djuned, S.H., M.Hum
NIP. 195709111984031002



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO, JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN: www.dpr.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2016**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2016 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementorian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 28 Februari 2017
INSPEKTUR UTAMA


Drs. Setyanta Nugralia, M.M.
NIP.19620719 198803 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016

Realisasi Pendapatan Negara s.d 31 Desember 2016 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp9.762.932.947,00 atau mencapai 533,49 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.830.000.000,00

Realisasi Belanja Negara s.d 31 Desember 2016 sebesar Rp3.699.126.643.200,00 atau mencapai 78,33 persen dari estimasi Belanja sebesar Rp4.722.693.041.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2016

Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.402.931.071.018,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp19.198.588.207,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.353.179.299.130,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp30.553.183.681,00. Sedangkan Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.980.265.401,00 dan Rp1.398.950.805.617,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp5.582.236.716,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp3.712.970.534.389,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai -Rp3.707.388.297.673,00. Terdapat Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp4.215.753.562,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar -Rp3.703.172.544.111,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp1.416.711.868.152,00, ditambah Defisit-LO sebesar -Rp3.703.172.544.111,00, kemudian ditambah dengan Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan senilai -Rp3.952.228.677,00 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar senilai Rp0,00 serta transaksi antar entitas senilai total Rp3.689.363.710.253,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp1.398.950.805.617,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2016		% thd Anggaran	31 DESEMBER 2015	
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI	
PENDAPATAN						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B1	1.830.000.000	9.762.932.947	533,49		7.008.492.249
JUMLAH PENDAPATAN		1.830.000.000	9.762.932.947	533,49		7.008.492.249
BELANJA						
Belanja Operasi	B2					
Belanja Pegawai	B3	1.044.034.388.000	976.415.980.055	93,52		806.040.744.223
Belanja Barang	B4	3.400.608.850.000	2.579.702.974.368	75,86		2.425.578.592.698
Belanja Modal	B5	278.049.803.000	143.007.688.777	51,43		366.349.606.821
JUMLAH BELANJA		4.722.693.041.000	3.699.126.643.200	78,33		3.597.968.943.742

Jakarta, 25 April 2017
Pengguna Anggaran


Achmad Djuned, S.H., M.Hum
NIP. 195700111984031002

II. NERACA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(DALAM RUPIAH)
31 DESEMBER 2015

ASET	CATATAN	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Penerimaan	C1	1.229.306.400	308.722
Kas Lainnya dan Setara Kas	C2	-	25.280.013
Piutang Bukan Pajak	C3	416.058.291	2.798.458.877
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C4	(24.751.291)	(13.992.282)
Piutang Bukan Pajak Netto		391.307.000	2.784.466.595
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C5	250.000.000	250.000.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C9	(1.250.000)	(1.250.000)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		248.750.000	248.750.000
Persediaan	C6	17.329.224.807	15.816.778.150
Persediaan Belum Diregister		-	-
JUMLAH ASET LANCAR		19.198.588.207	18.875.581.480
ASET TETAP			
Tanah	C7	188.409.157.000	188.409.157.000
Peralatan dan Mesin	C8	1.072.262.010.157	976.553.364.837
Gedung dan Bangunan	C9	873.425.270.646	848.056.166.736
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C10	80.700.987.120	76.887.829.174
Aset Tetap Lainnya	C11	19.024.010.706	18.924.576.788
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C12	329.911.400	18.194.294.551
Akumulasi Penyusutan	C13	(880.972.053.899)	(771.269.028.531)
JUMLAH ASET TETAP		1.353.179.299.100	1.355.536.366.553
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C14	37.076.312.745	33.075.269.837
Aset Lainnya	C15	14.837.981.852	14.297.767.460
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C16	(21.961.110.916)	(2.818.854.835)
JUMLAH ASET LAINNYA		30.553.183.681	46.554.178.262
JUMLAH ASET		1.402.931.071.018	1.420.966.120.295
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C17	508.590.100	1.191.288.346
Pendapatan Diterima Dimuka	C18	3.391.669.235	3.062.983.797
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		3.980.265.401	4.254.252.143
JUMLAH KEWAJIBAN		3.980.265.401	4.254.252.143
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C19	1.398.950.805.617	1.416.711.868.152
JUMLAH EKUITAS		1.398.950.805.617	1.416.711.868.152
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.402.931.071.018	1.420.966.120.295

Jakarta, 23 April 2017
Pegguna Anggaran


Achmad Djuraid, S.H., M.Hum
NIP. 19570911-198403 1 002

III. LAPORAN OPERASIONAL

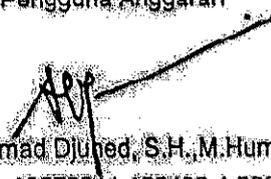
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D1	5.582.236.716	3.417.602.564
JUMLAH PENDAPATAN		5.582.236.716	3.417.602.564
BEBAN			
Beban Pegawai	D2	976.361.114.192	805.636.548.504
Beban Persediaan	D3	31.032.111.631	27.405.207.882
Beban Barang dan Jasa	D4	1.737.346.211.334	1.674.132.908.170
Beban Pemeliharaan	D5	110.967.422.237	105.149.930.540
Beban Perjalanan Dinas	D6	681.397.342.445	604.309.432.492
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D7	17.559.710.861	16.028.236.365
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D8	158.295.862.680	138.504.390.007
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D9	10.759.009	13.843.207
Beban Lain-Lain			
JUMLAH BEBAN		3.712.970.534.389	3.371.180.497.167
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3.707.388.297.673)	(3.367.762.894.603)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/DEFISIT DARI PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		1.219.172.578	574.980.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		122.909.076	65.523.628
Defisit Selisih Kurs			
SURPLUS/DEFISIT DARI PELEPASAN ASET NON LANCAR		1.096.263.502	509.456.372
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya		3.235.388.380	1.789.480.926
Beban Dari Kegiatan Non Operasional lainnya		115.898.320	10.945.000
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		3.119.490.060	1.778.535.926
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D10	4.215.753.562	2.287.992.298
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISI DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(3.703.172.544.111)	(3.365.474.902.305)

Jakarta, 25 April 2017

Pengguna Anggaran


 Achmad Djuned, S.H., M.Hum
 NIP. 19570911 198403 1 002

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

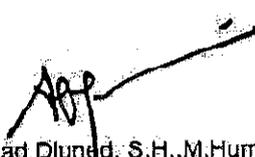
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015
EKUITAS AWAL	E1	1.416.711.868.152	1.185.915.232.025
SURPLUS/DEFISIT LO	E2	(3.703.172.544.111)	(3.365.474.902.305)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E3	-	-
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN	E4	(3.952.228.677)	5.311.086.939
Penyesuaian Nilai Aset	E4.1	-	228.513.878
Koreksi Nilai Persediaan	E4.2	218.121.973	78.597.283
Salisih Revaluasi Aset Tetap	E4.3	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E4.4	(4.170.350.649)	5.003.917.871
Lain-lain	E4.5	(1)	57.907
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E5	3.680.363.710.253	3.590.960.451.493
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E6	(17.761.062.535)	230.796.638.127
EKUITAS AKHIR	E7	1.398.950.805.617	1.416.711.868.152

Jakarta, 25 April 2017

Pengguna Anggaran


 Achmad Djuned, S.H., M.Hum
 NIP. 19570911 198403 1 002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Kode Lap : LRA-S-ML
Tanggal : 23/04/17 09:27 AM
Hariane :
Pg.1/D :
LHD (Revisi) 1/1

NO	URAIAN	2016				2015			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASIDIVANSI (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASIDIVANSI (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	1.830.000,000	9.782.932,947	(7.952.932,947)	533	1.830.000,000	7.408.492,249	(5.578.492,249)	388
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	1.830.000,000	9.782.932,947	(7.952.932,947)	533	1.830.000,000	7.408.492,249	(5.578.492,249)	388
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	1.044.034.388,000	976.415.980,055	67.618.407,945	94	1.211.773.665,000	806.040.744,223	405.732.920,777	57
	BELANJA BARANG	3.400.608.850,000	2.579.702,974,368	820.905.875,632	78	5.182.131.350,000	2.425.573.592,698	1.036.452.757,302	70
	BELANJA MODAL	278.049.803,000	143.007.688,777	135.042.114,223	51	517.163.733,000	366.349.606,821	51.114.126,179	71
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (BEL. BIL)	4.722.693.041,000	3.699.126.663,200	1.023.569.397,630	78	5.191.068.648,000	3.597.969.143,742	1.593.699.744,259	69
C	PEMBAYARAN				0				0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/EMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM/KEGAIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2016**

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 24/04/17 11:57
Halaman : 1
Png ID : laq. bel. sdfs. d. bau

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPAH KURNI							
01	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Titelis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI							
5781	Persediaan Konsumsi dan Perputera	8.304.102,000	7.854.102,000	4.163.936,000	281.210,695	3.882.725,305	49,44	3.971.376,695
5782	Persediaan Benda dan Mahkamah	2.978.254,000	2.678.234,000	1.418.895,800	16.134,700	1.402.761,100	52,34	1.275.472,900
5783	Facilitasi Kerja Sama Antar Parlemen	1.333.856,000	1.333.856,000	538.237,600	11.407,400	524.830,200	39,35	809.025,800
5784	Facilitasi Kesekretariatan Pimpinan	11.290.711,000	12.975.081,000	5.316.490,750	601.483,280	4.715.007,470	38,34	8.290.073,530
5785	Perbaikan Parlemen	223.003.722,000	193.702.549,000	157.811.401,740	745.340,200	157.066.061,540	81,09	35.636.467,460
5786	Pengembangan Kaprodiokan	23.916.538,000	16.607.198,000	6.420.857,708	3.537,250	6.416.820,458	38,64	10.190.257,544
5787	Penyelenggaraan Paripatutan Bidang Hukum dan Pengabdian Pengabdian Masyarakat	2.898.305,000	2.543.844,000	1.887.672,200	16.541,100	1.871.131,100	73,56	672.712,900
5788	Pengabdian SDM dan Organisasi	44.119.502,000	39.117.321,000	29.638.581,095	55.853,200	29.582.727,895	75,63	9.534.593,101
5789	Penunasan Perencanaan dan Keuangan	286.155.744,000	270.919.499,000	234.619.351,047	433.632,651	234.186.718,396	86,44	35.733.780,604
5790	Pengalokasian Barang Milik Negara	923.088.285,000	474.594.186,000	290.275.843,382	750,000	290.275.093,382	61,16	184.319,072,618
5791	Pengalokasian Sarana Prasarana Kantor	178.140.209,000	183.288.298,000	150.865.164,938	584.865,589	150.380,299,377	82	32.987.989,623
5792	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektoral I	2.557.104,000	2.557.104,000	1.428.74,600	42.169,700	1.384.804,900	54,15	1.172.459,100
5793	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektoral II	2.680.207,000	2.680.207,000	2.193.909,700	55.196,066	2.138.713,634	79,8	541.483,366
5794	Penyelenggaraan Peradilan dan Pelatihan	8.995.578,000	9.365.718,000	6.413.123,490	73.166,900	6.339.956,590	67,69	3.025.761,410
5795	Pengalokasian Dana dan Inkomasi	31.703.346,000	31.703.346,000	24.884.021,647	329.890,317	24.554.031,330	77,38	7.149.314,670
09	JUALAN BELANJA PROGRAM 01	1.751.072.453,000	1.251.918.474,000	917.850.281,727	3.231.679,048	914.618.582,679	63,698	337.289.881,321
5804	Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	149.990.324,000	147.352.850,000	80.209.541,788	8.900.329,155	71.309.212,632	48,39	76.043.387,368

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S/D BULAN DESEMBER 2016

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Kode Lrp : LRA.B.S.1
Tanggal : 24/04/17 11:57
Halaman : 2
Pg ID : lrp.bel.sdis.dbaru

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALAN BELANJA	BELANJA NETTO	8=5/4	9=4-7		
1										
5805	Peleaksanaan Tugas DPR RI Dalam Kerjasama Internasional	157.915.572,000	151.915.572,000	101.379.486,407	16.548.520,252	84.829.966,145	55,84	57.085.605,855		
5805	Peleaksanaan Representasi Rakyat dari Partisipasi Masyarakat	1.409.227.642,000	1.406.202.842,000	1.296.521.209,000	18.247.974,522	1.278.273.234,478	90,9	127.929.407,522		
5807	Pengelolaan Hak Keuangan dan Administrasi Dewan	997.824.873,000	1.008.247.847,000	964.644.279,862	723.035.103	963.921.244,779	95,6	44.326.402,221		
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 09	2.713.718.411,000	2.713.718.411,000	2.442.753.517,077	44.419.859,045	2.398.333.658,034	72,882	315.384.752,965		
10	Program Peleaksanaan Fungsi DPR RI									
5801	Peleaksanaan Fungsi Legislatif DPR RI	309.407.390,000	273.621.023,000	93.835.894,106	3.847.409,252	89.986.484,858	32,89	183.622.538,144		
5802	Peleaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI	53.221.303,000	53.184.423,000	20.859.152,709	709.449,000	19.359.704,700	36,4	33.824.718,300		
5803	Peleaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI	356.397.584,000	392.220.831,000	272.640.836,940	20.027.078,883	252.613.558,057	84,41	139.807.272,943		
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 10	719.026.277,000	719.026.277,000	386.545.883,748	24.583.936,135	361.961.747,613	44,567	357.064.529,387		
11	Program Dukungan Kesehatan Fungsi Dewan									
5795	Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan	11.771.508,000	11.771.508,000	7.933.466,586	390.534,415	7.542.932,536	64,06	4.228.575,465		
5797	Pemantauan Peleaksanaan Undang-Undang	4.008.068,000	3.911.878,000	2.642.741,150	288.019,530	2.363.721,650	60,42	1.548.156,350		
5798	Penyusunan Kajian APBN	4.696.465,000	3.980.311,000	3.628.840,400	578.370,620	3.048.469,780	78,59	531.641,220		
5799	Penyusunan Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	3.120.450,000	3.120.450,000	1.814.983,820	158.087,827	1.658.495,993	53,15	1.461.954,007		
5800	Pendidikan, Pengkajian, dan Pengembangan	15.982.064,000	15.245.932,000	9.890.675,710	281.640,654	9.599.034,916	62,96	5.846.897,084		
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 11	39.478.555,000	36.029.879,000	25.905.288,050	1.692.633,216	24.212.654,834	63,44	13.877.224,126		
	JUMLAH BELANJA RUMAH NEGARI	5.223.285.686,000	4.722.883.041,000	3.773.054.750,642	73.928.107,442	3.898.126.643,200	62,839	1.023.566.397,800		
	JUMLAH	9.223.285.686,000	4.722.883.041,000	3.773.054.750,642	73.928.107,442	3.898.126.643,200	62,84	1.023.566.397,800		

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Kode Lap : LRA.B.K.1
Tanggal : 29/04/17 9:30 AM
Halaman : 1
Pg ID : lap_jra_bel_akun

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7-5-6	8-5/4	9-4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	74.200.000,000	67.200.000,000	60.255.462,080	25.884.693	60.238.577,387	89,66	6.960.422,613
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.989,000	1.989,000	809,228	14.561	794,667	40,69	1.194,333
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.420.000,000	6.240.000,000	4.463.841,302	0	4.463.841,302	71,54	1.776.158,698
511121	Belanja Tunj. Suksesi PNS	2.988.000,000	2.485.000,000	1.284.745,317	0	1.284.745,317	51,47	1.211.253,683
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	3.280.000,000	3.055.000,000	3.030.510,000	0	3.027.260,000	99,2	27.740,000
511123	Belanja Tunj. Srvikal PNS	4.200.000,000	3.900.000,000	3.039.775,000	18.000,000	3.021.775,000	77,94	878.225,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.150.000,000	2.925.000,000	812.503,678	0	812.506,678	27,28	2.112.492,322
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	5.290.000,000	4.875.000,000	3.405.260,820	0	3.405.260,820	69,85	1.469.739,180
511126	Belanja Tunj. Baras PNS	12.484.662,000	10.575.960,000	8.666.313,000	0	8.661.136,000	83,84	1.714.224,000
511129	Belanja Tunj. Cacat PNS	113.620,000	113.620,000	0	0	0	0	113.620,000
511132	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar	112.105,000	112.105,000	0	0	0	0	112.105,000
511147	Belanja Tunjangan Urutan PNS	5.330.000,000	5.330.000,000	2.214.690,000	1.460,000	2.213.210,000	41,85	3.116.790,000
511151	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	118.530.306,000	106.824,074,000	87.383.919,425	53.811,254	87.330.108,171	81,3	19.493.965,829
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	30.990.960,000	32.723.080,000	32.566.480,000	123.693,300	32.444.820,700	99,51	283.259,300
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	1.560,000	1.560,000	217,440	140	217,300	13,94	1.342,700
511319	Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	3.039.036,000	3.039.036,000	2.745.778,000	1.134,000	2.742.642,000	90,28	296.394,000
511321	Belanja Tunj. Suksesi Pejabat Negara	1.215.615,000	1.215.615,000	750.985,200	151,200	750.834,000	61,78	464.781,000
511322	Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara	70.538.000,000	70.538.000,000	70.198.500,000	29.100,000	70.169.400,000	99,52	368.600,000
511323	Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	16.250.000,000	16.250.000,000	9.479.655,802	0	9.479.056,802	58,33	6.770.943,198
511324	Belanja Tunj. Pph Pejabat Negara	1.861.755,000	1.861.755,000	1.419.504,420	579,360	1.418.925,060	76,25	442.829,940
511325	Belanja Tunj. Boras Pejabat Negara	109.809,056,000	109.809,056,000	101.963,622,000	60.892,300	101.922,729,700	98,24	1.886.336,300
511331	Belanja Tunj. Komunikasi/Intensi Pejabat Negara	38.221.200,000	38.221.200,000	36.866.250,000	4.743,000	36.861.507,000	96,45	1.359.693,000
511332	Belanja Uang Kebutuhan Pejabat Negara	14.456.000,000	14.456.000,000	14.362.800,000	6.000,000	14.356.800,000	99,35	100.000,000
511333	Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara	30.513.600,000	30.513.600,000	29.264.150,000	3.187,500	29.264.962,500	95,92	1.248.637,500
511334	Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Negara	835.280,000	835.280,000	0	0	0	0	835.280,000
511337	Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara	313.131,512,000	313.131,512,000	289.640,541,882	229.446,800	289.411,039,082	95,89	14.058.136,938
5121	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5121	432.985.500,000	478.160.395,000	456.270.538,000	467.068,303	455.803.469,697	95,42	22.356.915,303
512111	Belanja Honorarium	432.985.500,000	478.160.395,000	456.270.538,000	467.068,303	455.803.469,697	95,42	22.356.915,303
512119	Belanja Uang Honor Tarap	432.985.500,000	478.160.395,000	456.270.538,000	467.068,303	455.803.469,697	95,42	22.356.915,303
5122	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	12.042.000,000	7.032.000,000	6.059.283,000	1.345,940	6.057.937,060	86,17	574.062,940
512211	Belanja Lain-lain	12.042.000,000	7.032.000,000	6.059.283,000	1.345,940	6.057.937,060	86,17	574.062,940
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122		12.042.000,000	7.032.000,000	6.059.283,000	1.345,940	6.057.937,060	86,17	574.062,940

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Kode Lcp : LRA.B.KL.1
Tanggal : 23/04/17 0:30 AM
Halaman : 2
Pg ID : lcp.lra_bpd.akun

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SELEHAH REVISI	REALISASI BELANJA					
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7	
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transitio	130.383.987,000	136.373.697,000	128.044.970,722	0	127.813.370,065	83,89	8.560.326.935	
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	35.382.981,000	2.175.000,000	0	0	0	0	2.175.000,000	
512412	Belanja Pegawai Transitio	165.727.586,000	138.548.697,000	128.044.970,722	231.690.657	127.813.370,065	52,42	10.785.326.935	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	165.727.586,000	138.548.697,000	128.044.970,722	231.690.657	127.813.370,065	52,42	10.785.326.935	
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	1.040.183.976,000	1.044.034.398,000	977.599.253,009	983.272.954	978.415.990,055	53,62	67.618.407,945	
	BELANJA BARANG								
521	Belanja Barang Operasional	155.273.646,000	129.868.523,000	107.096.083,524	0	107.086,083,524	62,47	22.772.439,476	
52111	Belanja Keperluan Pekarangan	1.036.540,000	1.036.540,000	823.318,200	0	823.318,200	79,51	212.221,800	
521113	Belanja Perbaikan Daya Tahan Tanah	1.022.760,000	713.932,000	248.022,500	0	248,022,500	34,28	466.909,500	
521114	Belanja Perbaikan Surat Dinas Pos Prset	8.954.480,000	5.862.227,000	4.231.856,900	1.300,500	4.230,556,400	72,19	1.631.670,900	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1.563.657.765,000	1.528.262.484,000	1.403.429.226,788	2.383.776,000	1.401.029,458,788	51,83	127.222.965,212	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1.729.144.211,000	1.665.744.646,000	1.515.823.509,912	2.385,076,500	1.513.438,439,412	91	152.066,208,598	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2.890.815,000	3.834.459,000	2.367.579,500	0	2.367,579,500	60,55	1.516.909,500	
5212	Belanja Bahan	212.890,311,000	229.259,251,000	153.962.573,900	733.861,250	153.226,712,650	67,16	76.630,548,350	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8.636,068,000	4.023.976,000	2.869.521,400	13.387,500	2.856,133,900	71,28	1.169.842,100	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	222.416.964,000	237.169,725,000	159.199,674,800	747.246,750	158.452,428,050	67,12	78.717.293,950	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	49.285,182,000	50.565,681,000	32.623,068,735	0	32,623,068,735	64,82	17.542,674,295	
521811	Belanja Barang Persediaan	7.896,060,000	7.187.793,000	6.881,032,318	0	6,981,032,318	57,12	206.760,682	
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	57.161.242,000	57.753,474,000	39.604,039,053	0	39,604,039,053	68,57	18.149,434,947	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	37.675.440,000	32.245,440,000	26.230,142,066	0	26,230,142,066	81,35	6.015,297,934	
5221	Belanja Jasa	12.414,848,000	6.726,649,000	2.532,856,681	0	2,932,856,681	43,6	3.793,191,319	
522111	Belanja Langganan Listrik	10.437,300,000	7.830,239,000	4.726,200,417	0	4,726,230,417	60,36	3.104,037,583	
522112	Belanja Langganan Telepon	1.680,000,000	1.680,000,000	0	0	0	0	1.680,000,000	
522113	Belanja Langganan Air	6.396,830,000	5.476,620,000	1.514,230,500	0	1,514,230,500	27,56	3.562,399,500	
522119	Belanja Jasa Konsultasi	59.197,820,000	59.050,862,000	1.365,477,000	0	1,365,477,000	2,31	57.885,385,000	
522131	Belanja Jasa Sewa	55.582,468,000	45.270,513,000	12.792,501,910	0	12,792,501,910	28,36	32.478,611,990	
522141	Belanja Jasa Profesi	6.973,300,000	27.755,413,000	15.388,298,800	0	15,388,298,800	55,44	12.267,114,200	
522151	Belanja Jasa Lainnya	189.369,286,000	186,035,134,000	64.949,707,374	0	64,949,707,374	34,31	121.085,426,626	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	37.417,414,000	79.295,371,000	45.392,442,900	0	45,392,442,900	57,24	33.902,928,100	
52311	Belanja Pemeliharaan								
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 23/04/17 9:30 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA						% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO	7=5-6	8=5/4	9=4-7		
52312	2 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3 150.000,000	4 600.000,000	5 201.228.000	6 0	7=5-6 201.228.000	8=5/4 33,54	9=4-7 398.772.000			
52319	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	13.762.394,000	19.826.368,000	16.765.338.600	0	16.765.338.600	94,56	3.081.029.400			
523121	Belanja Pemeliharaan Perlatan dan Mesin	32.600.698,000	29.999.061,000	22.661.409.154	0	22.661.409.154	70,03	7.227.671.846			
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Perlatan dan Mesin	0	199.000,000	140.190.240	0	140.190.240	70,45	58.809.760			
523129	Belanja Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	28.026.982,000	27.819.611,000	23.703.082.340	0	23.703.082.340	85,2	4.116.908.680			
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.200.000,000	1.912.275,000	1.361.783.000	0	1.361.783.000	71,21	550.482.000			
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	289.908,000	288.908,000	251.999.500	0	251.999.500	87,22	36.914.500			
524	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	113.444.707,000	159.850.614,000	110.467.467.734	0	110.467.467.734	69,13	49.553.148.266			
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	650.979.781,000	687.393.624,000	529.454.662.954	40.866.516.536	489.588.146.418	77,02	198.825.477.582			
524111	Belanja Perjalanan Bina	9.124.910,000	9.129.988,000	4.325.655,000	668.681,032	3.658.973.968	47,38	5.471.012.032			
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	41.607.360,000	41.529.909,000	17.622.878.298	58.508,000	17.564.378.298	42,43	23.965.501.702			
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	25.452.047,000	23.107.940,000	4.400.369.800	226.877.590	4.163.492.110	19,04	18.244.447.890			
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	727.564.058,000	761.161.459,000	555.783.566,052	41.828.575.258	513.954.990.794	73,02	247.208.468.206			
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	371.988.208,000	306.075.314,000	186.391.101.411	25.286.690.273	161.724.411.138	61,09	144.350.902.862			
524211	Belanja Perjalanan Bina - Luar Negeri	14.788.287,000	12.840.915,000	8.425.190.220	5.717.249.707	5.717.249.513	65,46	7.162.974.487			
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	366.774.495,000	318.956.223,000	195.426.291.691	27.983.939.940	167.442.361.651	61,27	151.513.872.345			
5261	Belanja Barang untuk disertakan kepada Masyarakat/Pemda	0	178.000,000	165.000,000	0	165.000,000	52,75	11.000,000			
526112	Belanja Perlatan dan Mesin Untuk Disertakan kepada	0	178.000,000	165.000,000	0	165.000,000	52,75	11.000,000			
5263	Belanja Barang Lainnya untuk disertakan kepada Masyarakat/Pemda	19.851.273,000	13.761.589,000	11.188.552.300	0	11.188.552.300	61,38	2.563.015.700			
526311	Belanja Barang Lainnya Untuk Disertakan Kepada Masyarakat/Pemda	19.851.273,000	13.761.589,000	11.188.552.300	0	11.188.552.300	61,38	2.563.015.700			
53	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3.444.726.276,000	3.400.608.850,000	2.962.647.899.656	72.944.834.488	2.579.702.974.368	76,01	820.905.875.632			
53	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0			
5321	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	153.590.272,000	161.939.306,000	125.671.764.776	0	125.671.764.776	77,6	36.267.541.224			
532111	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	0	290.000,000	163.594.000	0	163.594.000	95,8	6.406,000			
532121	Belanja Pemeliharaan Nilai Perlatan dan Mesin	153.590.272,000	162.139.306,000	125.665.358.776	0	125.665.358.776	77,63	36.273.947.224			
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	570.901.250,000	89.341.338,000	1.448.033,000	0	1.448.033,000	1,62	87.893.505,000			
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.759.700,000	22.236.468,000	13.860.061,552	0	13.860.061,552	62,33	8.376.604,450			
533121	Belanja Pemeliharaan Nilai Gedung dan Bangunan	558.141.550,000	111.577.894,000	15.308.094,552	0	15.308.094,552	13,72	96.269.709,450			

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA

: 002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 23/04/17 9:30 AM
Halaman : 4
Frg ID : lap_kel_bel_akun

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEAMBALAN BELANJA	BELANJA NETTO	8-5/4	9-4-7	
1	2	3	4	5	6	7-5-6	8-5/4	9-4-7	
5341	Belanja Modal Jalan, Fasilitas dan Jaringan	0	200.000.000	127.261.000	0	127.261.000	63,63	72.739.000	
534121	Belanja Modal Jigasi	300.000.000	771.516.000	716.004.531	0	716.004.531	92,8	55.511.469	
534161	Belanja Perambatan Neral Jaringan	380.000.000	971.516.000	843.265.531	0	843.265.531	86,8	128.250.469	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341								
5351	Belanja Modal Lainnya	821.322.000	3.261.177.000	990.989.920	0	990.989.920	29,48	2.370.287.080	
535111	Belanja Modal Lainnya	821.322.000	3.261.177.000	990.989.920	0	990.989.920	29,48	2.370.287.080	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361								
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	738.452.544.000	278.049.803.000	143.007.888.777	0	143.007.888.777	54,43	1.06.042.114.223	
	JUMLAH BELANJA	5.223.295.698.000	4.722.693.041.000	3.773.054.750.642	79.928.107.442	3.698.126.643.200	73,89	1.023.566.397.800	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016**
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA

: 002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Kode Lap : LRA.P.KL.1
Tanggal : 23/04/17 9:31 AM
Halaman : 1
Prg ID : lrp_12_pem_akum_M.v3

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6-4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMM (Pemeriksaan dan	30.000,000	1.219.172,578	0	1.219.172,578	4063,91
423129	Pendapatan dari Pemindahhanganan BMM Lainnya	1.800.000,000	4.179.451,446	0	4.179.451,446	232,19
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan					
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4231	1.830.000,000	5.398.624,024	0	5.398.624,024	2.148,05
4232	Pendapatan Jasa					
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1.211,035	0	1.211,035	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4232	0	1.211,035	0	1.211,035	0
4237	Pendapatan Luan dan Denda					
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	0	618.756,444	0	618.756,444	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4237	0	618.756,444	0	618.756,444	0
4239	Pendapatan Lain-lain					
423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganli Rugi Non Bendahara	0	32.008,700	0	32.008,700	0
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Laku	0	392.891,533	0	392.891,533	0
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Laku	0	969.180,335	0	969.180,335	0
423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Laku	0	2.350.260,876	0	2.350.260,876	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4239	0	3.744.341,444	0	3.744.341,444	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Kode Lap : LRA.PKL1
 Tanggal : 23/04/17 9:31 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_kr_pen_akun_M v3

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO		
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1.830.000.000	9.762.932.947	0	9.762.932.947	2.148,05	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.830.000.000	9.762.932.947	0	9.762.932.947	2.148,05	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Kode Lap : LO.KL

Tanggal : 23/04/17 9:28 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lo_kl

URAIAN	2016	2015	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	5,582,236,716	3,417,602,564	2,164,634,152	63.338
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	5,582,236,716	3,417,602,564	2,164,634,152	63.338
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	5,582,236,716	3,417,602,564	2,164,634,152	63.338
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	976,361,114,192	805,636,548,504	170,724,565,688	21.191
Beban Persediaan	31,032,111,631	27,405,207,882	3,626,903,749	13.294
Beban Barang dan Jasa	1,737,346,211,334	1,674,132,908,170	63,213,303,164	3.776
Beban Pemeliharaan	110,967,422,237	105,149,930,540	5,817,491,697	5.533
Beban Perjalanan Dinas	681,397,342,445	604,309,432,402	77,087,909,043	12.756
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	17,559,710,861	16,028,236,365	1,531,474,496	9.555
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 23/04/17 9:28 AM
Halaman : 2
Prq ID : lap_lo_kl

URAIAN	2016	2015	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	158.295.862,680	138.504.390,007	19.791.472,673	14.289
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	10.759,009	13.843,207	(3.084,198)	(22,28)
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3.712.970.534,389	3.371.180.497,167	341.790.037,222	10.139
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3.707.388,297,673)	(3.367.762,894,603)	(339.625,403,070)	10.085
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	1.098.263,502	509.456,372	588.807,130	115.183
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.219.172,578	574.980,000	644.192,578	112.037
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	122.909,076	65.523,628	57.385,448	87.58
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3.119.490,960	1.778.535,926	1.340.954,134	75.397
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3.235.388,380	1.789.480,926	1.445.907,454	80.8
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	115.898,320	10.945,000	104.953,320	958.918
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	4.215.753,562	2.287.992,299	1.927.761,264	84.258
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3.703.172,544,111)	(3.365.474,902,305)	(337.697,641,806)	10.034
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3.703.172,544,111)	(3.365.474,902,305)	(337.697,641,806)	10.034

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Kode Lap : LPE.KL

Tanggal : 23/04/17 9:28 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lpe_kl

URAIAN	2013	2015	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,416,711,868,152	1,185,915,232,025	230,796,636,127	19.461
SURPLUS/DEFISIT-LO	(0,700,172,544,111)	(0,055,474,902,005)	(007,697,641,600)	10.004
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(3,952,228,677)	5,311,086,939	(9,263,315,616)	(174.415)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	228,513,878	(228,513,878)	(100)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	218,121,973	78,597,283	139,524,690	177.518
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(4,170,350,649)	5,003,917,871	(9,174,268,520)	(183.342)
LAIN-LAIN	(1)	57,907	(57,908)	(100.002)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,689,363,710,253	3,590,960,451,493	98,403,258,760	2.74
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(17,761,062,535)	230,796,636,127	(248,557,698,662)	(107.698)
EKUITAS AKHIR	1,398,950,805,617	1,416,711,868,152	(17,761,062,535)	(1.254)

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Tgl. Cetak 23/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRYAN	NAMA PERKIRYAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	1,229,306,400	0
0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	415,359,691	0
0	115212	Piutang Lainnya	698,600	0
0	115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	250,000,000	0
0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBPN	0	24,747,798
0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	3,493
0	116411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0	1,250,000
0	117111	Barang Konsumsi	11,091,032,419	0
0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,693,029,822	0
0	117114	Suku Cadang	451,961,810	0
0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	2,461,778,004	0
0	117131	Bahan Baku	129,111,483	0
0	117199	Persediaan Lainnya	1,493,317,769	0
0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0	131111	Tanah	188,409,157,000	0
0	132111	Peralatan dan Mesin	1,072,262,010,157	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Tgl. Cetak 23/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0	133111	Gedung dan Bangunan	873,425,270,646	0
0	134111	Jalan dan Jembatan	24,055,221,329	0
0	134112	Irigasi	4,553,797,560	0
0	134113	Jaringan	52,091,968,231	0
0	135111	Aset Tetap Renovasi	14,986,653,857	0
0	135121	Aset Tetap Lainnya	4,037,362,849	0
0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	329,911,400	0
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	713,339,188,584
0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	135,554,504,605
0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	16,199,491,671
0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	779,562,213
0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	15,099,306,826
0	162151	Software	24,685,345,582	0
0	162161	Lisensi	1,187,684,600	0
0	162171	Hasil Kajian/ Penelitian	9,499,779,000	0
0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	2,503,503,563	0
0	166111	Aset Lain-lain	1,887,966,208	0
0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	12,750,015,644	0
0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	3,546,257,475
0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	18,069,363,691

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGERA/LEMBAGA : 002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Tgl. Cetak 23/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	345,489,750
0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	69,379,416
0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	327,868,750
0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	191,348,000
0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	3,391,669,235
0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Dibayar	0	0
0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,699,126,643,200
0	313121	Diterima dari Entitas Lain	9,762,932,947	0
0	391111	Ekuitas	0	1,416,711,868,152
0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	216,121,973
0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	12,285,779,506
0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	16,456,130,165	0
0	391119	Koreksi Lainnya	1	0
3	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,219,172,578
3	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,962,577,958
3	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	902,314
3	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	618,756,444
3	423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0	32,008,700
3	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	266,970,996

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Tgl. Cetak 23/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3	423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	602,493,685
3	423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	532,694,027
3	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	1,799,220,972
3	511111	Beban Gaji Pokok PNS	60,265,462,080	0
3	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	809,228	0
3	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	4,463,841,302	0
3	511122	Beban Tunj. Anak PNS	1,284,746,317	0
3	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	3,030,510,000	0
3	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	3,039,775,000	0
3	511125	Beban Tunj. PPh PNS	812,506,678	0
3	511126	Beban Tunj. Beras PNS	3,405,260,820	0
3	511129	Beban Uang Makan PNS	8,822,448,400	0
3	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	2,214,690,000	0
3	511311	Beban Gaji Pokok Pejabat Negara	32,568,480,000	0
3	511319	Beban Pembulatan Gaji Pejabat Negara	217,440	0
3	511321	Beban Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	2,749,776,000	0
3	511322	Beban Tunj. Anak Pejabat Negara	750,985,200	0
3	511323	Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	70,198,500,000	0
3	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	9,479,056,802	0
3	511325	Beban Tunj. Beras Pejabat Negara	1,419,504,420	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Tgl. Getak 23/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3	511331	Beban Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara	101,999,622,000	0
3	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	96,866,250,000	0
3	511333	Beban Uang Paket Harian Pejabat Negara	14,362,000,000	0
3	511334	Beban Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara	29,268,150,000	0
3	512111	Beban Uang Honor Tetap	456,261,169,000	0
3	512211	Beban Uang Lembur	6,059,289,000	0
3	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	128,049,349,459	0
3	521111	Beban Keperluan Perkantoran	107,090,083,524	0
3	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	823,318,200	0
3	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	249,022,500	0
3	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	4,231,856,900	0
3	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,403,817,235,554	0
3	521211	Beban Bahan	2,367,579,500	0
3	521213	Beban Honor Output Kegiatan	154,078,799,900	0
3	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,869,521,400	0
3	522111	Beban Langganan Listrik	26,230,142,066	0
3	522112	Beban Langganan Telepon	2,932,856,681	0
3	522113	Beban Langganan Air	4,658,227,783	0
3	522131	Beban Jasa Konsultan	1,514,230,500	0
3	522141	Beban Sewa	1,966,477,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGERI/LEMBAGA : 002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Tgl. Cetak 23/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAVAN	NAMA PERKIRAVAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3	522151	Beban Jasa Profesi	12,792,501,910	0
3	522191	Beban Jasa Lainnya	15,388,298,800	0
3	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	44,809,762,762	0
3	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	15,900,309,183	0
3	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22,885,254,714	0
3	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23,691,581,935	0
3	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	383,883,000	0
3	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	251,993,500	0
3	524111	Beban Perjalanan Biasa	529,434,662,954	0
3	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,325,655,000	0
3	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17,622,878,298	0
3	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,400,369,800	0
3	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	186,991,101,411	0
3	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	8,435,190,220	0
3	525311	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	17,559,710,861	0
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	116,412,803,059	0
3	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26,042,421,844	0
3	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1,151,991,856	0
3	591312	Beban Penyusutan Irigasi	180,905,540	0
3	591313	Beban Penyusutan Jaringan	1,795,633,645	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Tgl. Cetak 23/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3	592115	Beban Amortisasi Software	2,609,441,434	0
3	592116	Beban Amortisasi Lisensi	105,912,344	0
3	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	9,996,752,958	0
3	593111	Beban Persediaan konsumsi	24,246,161,494	0
3	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2,329,448,332	0
3	593114	Beban Persediaan suku cadang	715,188,811	0
3	593131	Beban Persediaan bahan baku	131,838,410	0
3	593149	Beban Persediaan Lainnya	6,654,111,727	0
3	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	115,898,320	0
3	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBK	11,285,360	0
3	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	526,351
3	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	63,384,386	0
3	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	122,909,076	0
3	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	25,884,693
3	511119	Pengembalian Beban Pembuatan Gaji PNS	0	14,561
3	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	3,250,000
3	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	18,000,000
3	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	5,182,000
3	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	1,480,000
3	511161	Pengembalian Beban Gaji Pokok Pejabat Negara	0	123,659,300

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Tgl. Cetak 23/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3	511319	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji Pejabat Negara	0	140
3	511321	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	0	1,134,000
3	511322	Pengembalian Beban Tunj. Anak Pejabat Negara	0	151,200
3	511323	Pengembalian Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	0	29,100,000
3	511325	Pengembalian Beban Tunj. Beras Pejabat Negara	0	579,360
3	511331	Pengembalian Beban Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara	0	60,892,300
3	511332	Pengembalian Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	0	4,743,000
3	511333	Pengembalian Beban Uang Paket Harian Pejabat Negara	0	6,000,000
3	511334	Pengembalian Beban Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara	0	3,187,500
3	521111	Pengembalian Beban Uang Honor Tetap	0	467,068,303
3	522211	Pengembalian Beban Uang Lembur	0	1,345,940
3	524111	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	231,600,657
3	521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	1,300,500
3	521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	2,383,770,000
3	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	733,861,250
3	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	13,387,500
3	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	40,866,516,536
3	524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	666,681,032
3	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	58,500,000
3	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	236,877,690

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Tgl. Cetak 23/04/2017

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3	524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	25,266,690,273
3	524219	Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	2,717,249,707
JUMLAH			6,119,247,275,805	6,119,247,275,805

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016 DAN 2015
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Tgl. Cetak 23/04/2017 9:28 AM

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2016	2015	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	1.229.306.400	308.722	1.228.997.678	398.092.03
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	25.280.013	(25.280.013)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	416.058.291	2.798.456.877	(2.382.398.586)	(85.13)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(24.751.291)	(13.992.282)	(10.759.009)	76.89
Piutang Bukan Pajak (Netto)	391.307.000	2.784.464.595	(2.393.157.595)	(85.95)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	250.000.000	250.000.000	0	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(1.250.000)	(1.250.000)	0	0.00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	248.750.000	248.750.000	0	0.00
Persediaan	17.329.224.807	15.816.778.150	1.512.446.657	9.56
JUMLAH ASET LANCAR	19.196.566.207	18.875.581.490	323.006.727	1.71
ASET TETAP				
Tanah	188.409.157.000	188.409.157.000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	1.072.262.010.157	976.553.364.837	95.708.645.320	8.80
Gedung dan Bangunan	873.425.270.646	848.056.166.736	25.369.103.910	2.99
Jalan, Irigasi dan Jaringan	80.700.987.120	76.887.829.174	4.013.157.946	5.23
Aset Tetap Lainnya	19.024.016.708	18.924.576.786	99.439.920	0.53
Konstruksi Dalam Pengerjaan	329.911.400	18.194.294.551	(17.864.383.151)	(98.19)
Akumulasi Penyusutan	(880.972.053.899)	(771.289.028.531)	(109.683.025.368)	14.22
JUMLAH ASET TETAP	1.353.179.299.130	1.355.536.360.553	(2.357.061.423)	(0.17)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	37.876.312.745	35.075.265.637	2.801.047.108	7.99
Aset Lain-lain	14.637.981.852	14.297.787.480	340.214.392	2.38
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(21.981.110.916)	(2.818.854.835)	(19.142.256.081)	679.08
JUMLAH ASET LAINNYA	30.553.183.681	46.554.178.262	(16.000.994.581)	(34.37)
JUMLAH ASET	1.402.931.071.018	1.420.966.120.295	(18.035.049.277)	(1.27)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	588.596.166	1.191.268.346	(602.672.180)	(50.59)
Pendapatan Diterima Dimuka	3.391.669.235	3.062.983.797	328.685.438	10.73
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.980.265.401	4.254.252.143	(273.986.742)	(6.44)
JUMLAH KEWAJIBAN	3.980.265.401	4.254.252.143	(273.986.742)	(6.44)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1.398.950.805.617	1.416.711.868.152	(17.761.062.535)	(1.25)
JUMLAH EKUITAS	1.398.950.805.617	1.416.711.868.152	(17.761.062.535)	(1.25)
JUMLAH EKUITAS	1.398.950.805.617	1.416.711.868.152	(17.761.062.535)	(1.25)

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2016 DAN 2015
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Tgl. Cetak 23/04/2017 9:28 AM

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2016	2015	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,402,931,071,018	1,420,966,120,293	(18,035,049,277)	(1.27)

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain itu, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat berkomitmen dengan Visi "terwujudnya DPR RI sebagai Lembaga Perwakilan yang kredibel dalam mengembang tanggung jawab mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut

1. Mewujudkan Penyelenggaraan fungsi legislasi yang efisien dan efektif, dengan
 - 1). Terwujudnya DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang independen dan profesional melalui kekuasaan pembentukan Undang-undang dan pelaksanaan fungsi legislasi
 - 2). Terbangunnya kapasitas DPR RI yang mumpuni dalam pembentukan Undang-undang yang berkualitas
 - 3). Tercapainya kelembagaan DPR RI yang mantap dalam pelaksanaan fungsi legislasi.
2. Mewujudkan fungsi penyelenggaraan negara yang akuntabel dan transparan dan efektif dengan tujuan:
 - 1). Terwujudnya politik anggaran yang akuntabel dan transparan;
 - 2). Terbangunnya kapasitas DPR RI dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai kebutuhan masyarakat;
 - 3). Tercapainya tata kelola kedewanan yang terpercaya dalam pelaksanaan fungsi anggaran.
3. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi pengawasan yang transparan dan efektif, dengan tujuan:
 - 1). Terwujudnya citra DPR RI yang kuat melalui pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif, efisien dan berkualitas;
 - 2). Terwujudnya penyelenggaraan sistem pengawasan yang mumpuni dalam rangka terciptanya sistem ketatanegaraan yang baik (*good governance*);
 - 3). Tercapainya kinerja pengawasan DPR RI yang akuntabel sebagai bentuk transparansi lembaga perwakilan kepada masyarakat;
 - 4). Tercapainya tata kelola kedewanan yang terpercaya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
4. Mewujudkan kelembagaan DPR RI yang kuat, aspiratif dan akomodatif dengan tujuan:
 - 1). Terwujudnya lembaga perwakilan yang kuat dalam memperjuangkan aspiratif masyarakat;
 - 2). Terwujudnya kelembagaan DPR RI yang aspiratif melalui peningkatan penyerapan aspirasi masyarakat yang efektif dan berkualitas;
 - 3). Tercapainya kapasitas DPR RI yang akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat;

- 4). Tercapainya kinerja DPR RI yang optimal dalam pelaksanaan tugas konstitusional melalui penyelenggaraan hak-hak keuangan dan administrasi Dewan;
- 5). Terwujudnya penegakan Tata Tertib dan Kode Etik sehingga tercipta kelancaran kerja DPR dalam melaksanakan fungsi-fungsinya;

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terdiri atas Dua Eselon I, yaitu Eselon I Sekretariat Jenderal dan Eselon I Dewan. Masing Masing Eselon I hanya memiliki satu satuan kerja, yaitu satuan kerja Sekretariat Jenderal dan Satuan Kerja Dewan.

Pendekatan Penyusunan
Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan TA 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3. Basis Akuntansi

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh

suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Pendapatan LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
 - * Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - * Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada

tanggal neraca.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu)
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan

kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi

penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan antara lain:

- 1 Adanya penambahan output untuk Pembentukan dan pembahasan RUU usul DPR RI, penambahan Output untuk Fit and Proper Test, serta penambahan anggaran penanganan kasus kasus Spesifik Komisi.
- 2 Pembayaran berbagai tunggakan pekerjaan tahun anggaran 2015 serta pemenuhan prioritas kebutuhan dan mempercepat kinerja DPR RI pada program Pelaksanaan Fungsi DPR RI
- 3 Adanya perubahan struktur organisasi yang berimplikasi pada penambahan anggaran pada beberapa kegiatan
- 4 Adanya pemotongan anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden tentang Penghematan Anggaran

Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja Pegawai	1.040.116.876.000	1.044.034.388.000
Belanja Barang	3.444.726.276.000	3.400.608.850.000
Belanja Modal	738.452.544.000	278.049.803.000
Jumlah Belanja	5.223.295.696.000	4.722.693.041.000

Apabila dilihat dari Program yang ada di DPR RI, maka revisi DIPA yang ada mengakibatkan pergeseran antar program, yang salah satunya disebabkan adanya pembatalan rencana pembangunan gedung. Rincian pergeseran antar program disajikan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI	1.751.072.453.000	1.251.918.474.000
Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	2.713.718.411.000	2.713.718.411.000
Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI	719.026.277.000	719.026.277.000
Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan	39.478.555.000	38.029.879.000
Jumlah Belanja	5.223.295.696.000	4.722.693.041.000

Realisasi Pendapatan
Rp9.762.932.947,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2016 Nomor: NK-03/PB.6/2017 adalah sebesar Rp9.762.932.947,00 atau mencapai 533,49 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.830.000.000,00.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, terdapat pengurangan realisasi pendapatan sebesar Rp1.200.000,00 dengan nomor NTPN 0300090506040315 tertanggal 31 Desember 2016 yang proses ralat ke satker Khusus Penerimaan Bendahara Umum Negara pada periode *unaudited* dengan surat nomor BK/03157/SETJEN DPR RI/02/2017 telah selesai dieksekusi pada bulan april 2017 oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2016		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Pendapatan Dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) Serta Pendapatan dari Penjualan	1.830.000.000	5.398.624.024	295,007
Pendapatan Jasa	-	1.211.035	100,000
Pendapatan Iuran dan Denda	-	618.756.444	100,000
Pendapatan Lain-Lain	-	3.744.341.444	100,000
Total	1.830.000.000	9.762.932.947	533,494

Selain pengurangan pendapatan akibat proses ralat, berdasarkan nota kesepakatan tersebut, terdapat reklasifikasi akun pendapatan yang diajukan dengan surat nomor DA/06656/SETJEN DPR RI/PK.04/IV/2017 tertanggal 11 April 2017, dengan rincian sebagai berikut:

No	Semula	Menjadi		
1	245FA8HRE052NS3P (423952)	18.262.339	423752	18.262.339
2	E2F400112R08LADP (423953)	206.467.355	423953	33.467.355
			423752	173.000.000
	Total	224.729.694		224.729.694

Realisasi s.d 31 Desember 2016 melebihi estimasi pendapatan yang disebabkan oleh adanya peningkatan yang signifikan pada pendapatan sewa PNBPN yang berasal dari sewa wisma DPR RI di Kopo serta PNBPN yang berasal dari pemanfaatan area gedung perkantoran DPR RI dan penerimaan yang bersumber dari penjualan/pelepasan aset. Selain itu terdapat pendapatan lain-lain yang bersumber dari pengembalian kelebihan belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL) serta pembayaran denda keterlambatan atas sewa PNBPN yang merupakan tindak lanjut atas temuan BPK pada audit Laporan Keuangan TA 2015.

Selama TA 2016 ditemukan adanya setoran pendapatan dari PT Taspen yang merupakan potongan atas pembayaran pensiun. Potongan tersebut disebabkan adanya kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan anggota periode 2004 - 2009 sebesar Rp234.345.650,00 (Rincian terlampir). Dari setoran tersebut, sejumlah Rp60.050.000,00 menggunakan akun 423951 dan sejumlah Rp174.295.650,00 menggunakan akun 423921.

Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut melalui dokumen yang diperoleh dari PT Taspen, diketahui bahwa hanya sebesar Rp53.258.700,00 yang dapat dicatat dan diakui sebagai pendapatan DPR RI. Sebesar Rp181.086.950,00 seharusnya dicatat oleh Satker Khusus Pensiun Direktorat Jenderal Perbendaharaan (kode Satker 987361). Atas temuan tersebut, dilakukan koreksi penerimaan Negara dengan Surat Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara Nomor DA/00939/SETJEN DPR RI/PK.04/I/2017 tanggal 19 Januari 2017, Nomor DA/00938/SETJEN DPR RI/PK.04/I/2017 tanggal 19 Januari 2017. Atas Perbaikan tersebut, Kementerian Keuangan telah melakukan perubahan pada Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN).

Selain itu, terjadi koreksi penyetoran yang dilakukan oleh Taspen yang dilakukan setelah tanggal pelaporan (rincian NTPN terlampir). Atas penyetoran tersebut, telah dilakukan koreksi ke KPPN dengan mereklas setoran tersebut ke Satker Transaksi Khusus Suspen Penerimaan (kode satker 999984) dengan rincian sebagai berikut:

No	Semula (Kode)			Menjadi (Kode)		
	Satker	Kode MAP	Jumlah	Satker	Kode MAP	Jumlah
1	001012	423921	1.000.000	999984	423999	1.000.000
2	001012	423951	1.322.289	999984	423999	1.322.289
3	001012	423921	1.000.000	999984	423999	1.000.000
4	001012	423951	1.200.000	999984	423999	1.200.000
5	001012	423951	1.500.000	999984	423999	1.500.000

Selanjutnya Realisasi Pendapatan s.d 31 Desember 2016 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan s.d 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 39,30 persen. Hal ini disebabkan pendapatan lain-lain yang bersumber dari pengembalian kelebihan belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL) serta pembayaran denda keterlambatan atas sewa PNB yang merupakan tindak lanjut atas temuan BPK pada audit Laporan Keuangan TA 2015

Perbandingan Realisasi Pendapatan s.d 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2016	Realisasi s.d 31 Desember 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) Serta Pendapatan dari Penjualan	5.398.624.024	5.037.267.040	7,17
Pendapatan Jasa	1.211.035	149.107	712,19
Pendapatan Iuran dan Denda	618.766.444	87.484.595	607,27
Pendapatan Lain-Lain	3.744.341.444	1.883.591.507	98,79
Total	9.762.932.947	7.008.492.249	39,30

Ditemukan pula adanya setoran langsung oleh KPPN yang merupakan pencairan Bank Garansi yang dilakukan KPPN atas pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.817.566.850,00 yang terdiri atas setoran sebesar Rp407.990.000,00 dengan akun Pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (kode akun 423953) dengan nomor NTPN 0115080315140414 dan setoran sebesar Rp1.409.576.850,00 dengan akun Pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (kode akun 423953) dengan nomor NTPN 1013020215030313.

Ditemukan pula berbagai setoran jasa giro yang dilakukan langsung oleh bank mitra kerja satker sebesar Rp902.314,00 (daftar terlampir). Selain itu telah dilakukan penyetoran atas jasa giro pada rekening bendahara penerimaan sebesar Rp308.721,00 yang merupakan temuan BPK pada tahun anggaran 2015.

Selama TA 2016, DPR RI melakukan berbagai perbaikan atas Transaksi Penerimaan Negara diantara perbaikan atas Kode Satker akibat kesalahan penyetoran antara satker Setjen dan Satker Dewan serta Perbaikan yang diakibatkan adanya setoran oleh Satker Lain yang menggunakan kode BA DPR RI. Seluruh Perbaikan atas transaksi negara dapat diselesaikan sampai dengan periode penyusunan laporan keuangan per 31 Desember 2016.

Pada tanggal pelaporan, baru diketahui adanya saldo pada rekening Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.229.306.400,00 yang merupakan pendapatan sewa gedung dan bangunan atas sewa lahan yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri Persero, Tbk. Atas saldo tersebut, telah dilakukan penyetoran ke kas negara pada tanggal 6 Februari 2017 dengan NTPN 8AD328378GKJQHV8.

Realisasi Belanja
Rp3.699.126.643.200,00

B.2 BELANJA

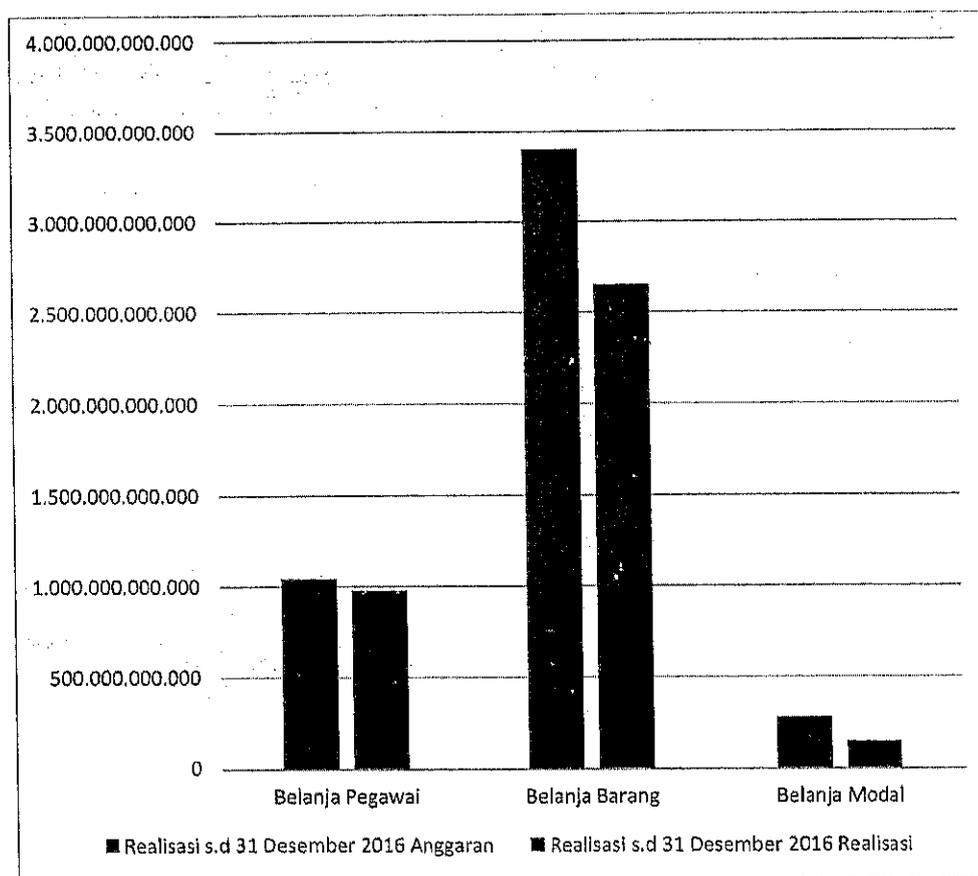
Realisasi Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia s.d 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3.699.126.643.200,00 atau sebesar 78,33 persen dari anggaran belanja sebesar Rp4.722.693.041.000,00.

Rincian Estimasi Belanja dan Realisasi Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2016		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Belanja Pegawai	1.044.034.388.000	977.399.253.009	93,62
Belanja Barang	3.400.608.850.000	2.652.647.808.856	78,01
Belanja Modal	278.049.803.000	143.007.688.777	51,43
Total Belanja Kotor	4.722.693.041.000	3.773.054.750.642	79,89
Pengembalian Belanja	-	73.928.107.442	100,00
Total Belanja	4.722.693.041.000	3.699.126.643.200	78,33

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program s.d 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Program	Realisasi s.d 31 Desember 2016		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI	1.251.918.474.000	914.618.582.679	73,06
Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	2.713.718.411.000	2.398.333.658.034	88,38
Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI	719.026.277.000	361.961.747.613	50,34
Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan	38.029.879.000	24.212.654.874	63,67
Total Belanja	4.722.693.041.000	3.699.126.643.200	78,33

Realisasi Belanja s.d 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar 2,81 persen jika dibandingkan dengan periode s.d 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Teridentifikasi adanya pemberian Gaji Ke-13 dan Ke-14 untuk Anggota DPR RI, Pegawai, Tenaga Ahli, Staf Administrasi dan Staf Khusus Pimpinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016.
2. Teridentifikasi adanya peningkatan pada belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri sebagai akibat meningkatnya jumlah anggota yang melakukan kegiatan sosialisasi Undang-Undang. Terdapat pembayaran Dana Aspirasi Setahun Sekali sesuai dengan SK Sekjen No 743/SEKJEN/2016. Selain itu terdapat peningkatan belanja barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat selama TA 2016.
3. Penurunan yang sangat signifikan pada belanja modal pada TA 2016 yang disebabkan banyaknya penambahan aset tetap telah dilaksanakan pada TA 2015. Selain itu, rencana pengadaan Gedung dan Bangunan belum dapat dilaksanakan pada TA 2016 dikarenakan masih terkendala aturan pelaksanaan.

Perbandingan Realisasi Belanja s.d 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2016	Realisasi s.d 31 Desember 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	976.415.980.055	806.040.744.223	21,14
Belanja Barang	2.579.702.974.368	2.425.578.592.698	6,35
Belanja Modal	143.007.688.777	366.349.606.821	-60,96
Total	3.699.126.643.200	3.597.968.943.742	2,81

Pada akhir tahun 2015, terdapat saldo Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp1.191.268.346,00. Atas saldo tersebut, sebesar Rp25.280.013,00 telah tersedia di Bendahara Pengeluaran namun belum didistribusikan kepada pihak ketiga. Selama TA 2016, terdapat pembayaran atas Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2015, baik berupa belanja pegawai, belanja barang maupun belanja modal senilai Rp1.165.988.333,00 dimana sebesar Rp80.975.379,00 merupakan pembayaran atas tunggakan belanja pegawai, sebesar Rp329.387.754,00 merupakan pembayaran atas tunggakan belanja barang, dan sebesar Rp755.625.200,00 merupakan pembayaran atas tunggakan belanja modal. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga yang telah diselesaikan disajikan sebagai berikut:

No	Akum	Jumlah	Keterangan
1	51	80.975.379	Kekurangan Tunkin dan Honor
2	52	329.387.754	kesalahan ADK dan Kesalahan SPM
3	53	755.625.200	kesalahan ADK dan Kesalahan SPM
	Total	1.165.988.333	/

Atas saldo Utang Kepada Pihak Ketiga yang telah tersedia di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp25.280.013,00, telah diselesaikan melalui pengembalian kepada kas negara. Hal tersebut disebabkan tidak diambilnya gaji Tenaga Ahli yang sudah disediakan di Bendahara Pengeluaran. Rincian pengembalian ke kas negara disajikan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Dikembalikan ke kas Negara (NTPN 0B85D5J1AEPGAPOO)	18.027.096,00
Dikembalikan ke kas Negara (NTPN A5FE56AQOOM057K8)	7.252.917,00
Total	25.280.013,00

Belanja Pegawai
Rp976.415.980.055,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai s.d 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing masing sebesar Rp976.415.980.055,00 dan Rp806.040.744.223,00 atau mengalami kenaikan sebesar 21,14 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh:

1. Pada TA 2016, teridentifikasi adanya pemberian Gaji Ke-13 dan Ke-14 untuk Anggota DPR RI, Pegawai, Tenaga Ahli, Staf Administrasi dan Staf Khusus Pimpinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016.
2. Terdapat penambahan besaran tunjangan Kinerja yang disebabkan adanya penyesuaian Grade yang disebabkan adanya Pengangkatan Pejabat Baru serta penambahan tenaga Fungsional di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Selain itu, terdapat peningkatan indeks Tunjangan Kinerja untuk seluruh pegawai yang berlaku untuk periode November 2015 sd November 2016 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2016 yang diimplementasikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 23 Tahun 2016.
3. Serta terdapat peningkatan belanja honorarium/Uang Honor Tetap pada Satker Dewan yang diakibatkan adanya peningkatan pengesahan berbagai RUU

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai s.d 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2016	Realisasi s.d 31 Desember 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	87.383.919.425	83.764.011.325	4,32
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	299.640.541.862	283.053.198.515	5,86
Belanja Honorarium	456.270.538.000	324.093.675.000	40,78
Belanja Lembur	6.059.283.000	6.612.866.000	-8,37
Belanja Tunjangan Khusus dan Pegawai Transito	128.044.970.722	110.010.524.352	16,39
Jumlah Belanja Kotor	977.399.253.009	807.534.275.192	21,04
Pengembalian Belanja	983.272.954	1.493.530.969	-34,16
Jumlah Belanja	976.415.980.055	806.040.744.223	21,14

Selama Tahun Anggaran 2016, terdapat pembayaran belanja pegawai yang merupakan tunggakan belanja tahun anggaran 2015 sebesar Rp80.975.379,00 yang terdiri atas pembayaran kekurangan tunjangan kinerja sebesar Rp71.600.379,00 yang dibayarkan dengan SPM nomor 00071 tanggal 1 April 2016, serta sebesar Rp9.375.000,00 merupakan kekurangan honor tenaga ahli pada alat kelengkapan dewan yang dibayarkan dengan SPM nomor 01399 tanggal 1 Juni 2016.

Pada tanggal pelaporan, diketahui adanya kekurangan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp69.379.416,00 akibat adanya perubahan/mutasi pegawai yang berlaku mundur periode Agustus sd Desember 2016 dan akan dibayarkan pada TA 2017.

Selain itu, terdapat pengeluaran yang karakteristiknya merupakan Belanja Pegawai namun dianggarkan dan direalisasikan melalui Belanja Barang yang terdiri dari pembayaran Uang Representasi Pimpinan Fraksi sebesar Rp1.216.600.000,00 dan pembayaran Uang Komunikasi Intensif dan Penanganan Pengaduan Masyarakat sebesar Rp56.099.500.000,00.

Belanja Barang
Rp2.579.702.974.368,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang s.d 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing masing sebesar Rp2.579.702.974.368,00 dan Rp2.425.578.592.698,00 atau mengalami kenaikan sebesar 6,35 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh:

- 1 Teridentifikasi adanya peningkatan yang cukup signifikan pada belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri sebagai akibat meningkatnya jumlah anggota yang melakukan kegiatan sosialisasi Undang-Undang. Selain itu, terdapat pembayaran Dana Aspirasi Setahun Sekali pada Semester I TA 2016 sesuai dengan SK Sekjen No 743/SEKJEN/2016
- 2 Teridentifikasi adanya peningkatan belanja barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang s.d 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2016	Realisasi s.d 31 Desember 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.515.823.509.912	1.474.864.421.525	2,78
Belanja Barang Non Operasional	159.199.674.800	151.135.297.350	5,34
Belanja Barang Persediaan	39.604.039.053	40.867.906.581	-3,09
Belanja Jasa	64.949.707.374	56.666.038.278	14,62
Belanja Pemeliharaan	110.497.467.734	99.391.921.942	11,17
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	555.783.566.052	462.559.924.550	20,15
Belanja Perjalanan Luar Negeri	195.426.291.631	212.197.868.381	-7,90
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	165.000.000	253.110.000	-34,81
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	11.198.552.300	-	100,00
Jumlah Belanja Kotor	2.652.647.808.856	2.497.936.488.607	6,19
Pengembalian Belanja	72.944.834.488	72.357.895.909	0,81
Jumlah Belanja	2.579.702.974.368	2.425.578.592.698	6,35

Pada Tahun Anggaran 2015, terdapat belanja barang yang masih harus dibayar dan telah tercatat sebagai hutang kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

No	No SPM (Akun)	Jumlah	Keterangan
1	007792 (523121)	88.198.000	ADK SPM Belum Terkonversi
2	008011 (523111)	4.296.100	Kesalahan Data Suplier
3	008319 (523111)	160.474.950	Kesalahan Pencantuman NRK
4	008321 (523111)	8.446.050	Kesalahan Pencantuman NRK
5	008093 (522113)	67.972.654	ADK SPM Belum Terkonversi
Total		329.387.754	

Dari kelima tagihan tersebut, seluruh tagihan telah dapat dibayarkan pada TA 2016 dengan rincian sebagai berikut:

No	No SP2D (Akun)	Jumlah	Tanggal SP2D
1	61821303003572 (522113)	67.972.654	Rabu, 23 Maret 2016
2	61821302046064 (523121)	88.198.000	Kamis, 17 November 2016
3	61821302020485 (523111)	4.296.100	Rabu, 29 Juni 2016
4	61821302033147 (523111)	160.474.950	Kamis, 15 September 2016
5	61821302033148 (523111)	8.446.050	Kamis, 15 September 2016
Total		329.387.754	

Pada akhir tahun anggaran 2016, diketahui terdapat pekerjaan yang sampai dengan batas akhir penagihan, belum dapat diselesaikan 100%. Namun demikian, atas pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100% dengan syarat pihak penyedia menyerahkan Garansi Bank kepada DPR RI untuk kemudian diserahkan kepada KPPN Jakarta VII selaku mitra Satker Sekretariat Jenderal DPR RI. Seluruh pekerjaan dapat diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2016, sehingga pada Tanggal 5 Januari 2017 dikeluarkan surat nomor DA/00115/SETJEN DPR RI/PK.02/01/2017 tentang Pengambilan 5 (lima) Garansi Bank Asli kepada Kepala KPPN Jakarta VII. Surat serupa juga diterbitkan pada tanggal 9 Januari 2017 nomor: DA/00179/SETJEN DPR RI/PK.02/01/2017 untuk pengambilan 11 Garansi Bank Asli di KPPN Jakarta VII

Selain itu, pada tanggal pelaporan diketahui bahwa beberapa tagihan belanja barang belum dapat diselesaikan pembayarannya pada KPPN, sehingga menjadi Hutang Kepada Pihak Ketiga (Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar) dengan rincian sebagai

No	No SPM (Akun)	Jumlah	Keterangan
1	03899 (523111)	149.014.150	Peremajaan Taman DPR RI
2	03881 (523121)	90.158.800	Perbaikan UPS DPR RI
3	03869 (523121)	88.695.800	Perbaikan Instalasi Pipa
Total		327.868.750	

Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan DPR RI Tahun 2016 Nomor: NK-03/PB.6/2017, diketahui adanya belanja barang pemeliharaan yang teridentifikasi sebagai belanja modal, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Teridentifikasi	Jumlah
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Gedung dan Bangunan	361.704.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Gedung dan Bangunan	191.342.696,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Peralatan dan mesin	198.873.188,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Peralatan dan mesin	10.005.721,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Peralatan dan mesin	79.770.735,00

Uraian	Teridentifikasi	Jumlah
Belanja Pemeliharaan Peralatan	Peralatan dan mesin	11.500.405,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Irigasi	164.621.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Jalan dan Jembatan	499.060.000,00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jalan dan Jembatan	977.900.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jaringan	114.069.265,00
Total		2.608.847.010,00

Selain itu, terdapat Belanja Barang yang karakteristiknya merupakan Belanja Pegawai terdiri dari pembayaran Uang Representasi Pimpinan Fraksi sebesar Rp1.216.600.000,00 dan pembayaran Uang Komunikasi Intensif dan Penanganan Pengaduan Masyarakat sebesar Rp56.099.500.000,00.

Belanja Modal
Rp143.007.688.777,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal s.d 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing masing sebesar Rp143.007.688.777,00 dan Rp366.349.606.821,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 60,96 persen jika dibandingkan TA 2015. Penurunan ini disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan yang telah dianggarkan namun belum dapat dilaksanakan, antara lain penambahan peralatan tv parlemen, dan pembuatan film edukasi DPR RI, Pembangunan Sistem Manajemen Aset, serta berbagai pekerjaan pengadaan dan penambahan nilai berbagai aset penunjang kerja.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal s.d 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2016	Realisasi s.d 31 Desember 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.865.358.776	327.016.375.305	-61,51
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.308.094.550	35.999.742.638	-57,48
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	843.265.531	169.770.700	396,71
Belanja Modal lainnya	990.969.920	3.163.718.178	-68,68
Jumlah Belanja	143.007.688.777	366.349.606.821	-60,96

Pada TA 2016, terdapat pembayaran belanja modal atas tunggakan Tahun Anggaran 2015 berupa pekerjaan renovasi toilet, pekerjaan perbaikan lift serta pekerjaan pemasangan pagar tanaman sebesar Rp755.625.200,00 dimana sebesar Rp167.361.500,00 dibayarkan dengan menggunakan akun 532 dengan nomor SPM 02491 dan sebesar Rp588.263.700,00 dibayarkan dengan menggunakan akun 533 dengan nomor SPM 02380. Selain pembayaran tunggakan atas pekerjaan tahun anggaran 2015, terdapat pembayaran belanja modal peralatan mesin sebesar Rp407.990.000,00 dengan nomor SPM 02399 yang merupakan pembayaran atas pencairan bank garansi atas pekerjaan tahun anggaran 2015.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp125.865.358.776,00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin s.d 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing masing sebesar Rp125.865.358.776,00 dan Rp327.016.375.305,00 atau mengalami penurunan sebesar 61,51 persen. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan anggaran belanja modal yang ditetapkan pada TA 2016. Hal tersebut disebabkan beberapa pengadaan belanja modal untuk keperluan operasional seperti pengadaan kendaraan operasional telah dilaksanakan pada TA 2015. Selain itu, terdapat beberapa belanja modal peralatan dan mesin yang justru dibayarkan dengan belanja modal gedung dan bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin s.d 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2016	Realisasi s.d 31 Desember 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.671.764.776	325.667.440.305	-61,41
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan mesin	193.594.000	1.348.935.000	-85,65
Jumlah Belanja Kotor	125.865.358.776	327.016.375.305	-61,51
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	125.865.358.776	327.016.375.305	-61,51

Dari belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp125.865.358.776,00 hanya sebesar Rp120.729.294.211,00 yang membentuk peralatan mesin. Sebesar Rp5.136.064.565,00 teridentifikasi sebagai Aktiva Tak Berwujud, belanja barang, gedung dan bangunan, Jalan Irigasi dan jaringan serta peralatan dan mesin ekstrakomptabel, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2016
Total Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.865.358.776
- Teridentifikasi sebagai Belanja Peralatan dan Mesin	120.729.294.211
Teridentifikasi sebagai:	5.136.064.565
- Aset Tak Berwujud	2.877.469.600
- Belanja Barang	305.225.425
- Belanja Pemeliharaan	288.018.960
- Belum Membentuk BMN (Honor)	7.980.000
- Gedung dan Bangunan	24.521.544
- Jalan, Irigasi dan jaringan	954.640.150
- Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	90.257.386
- Pembayaran Tunggakan	575.351.500
- Kealahan Administrasi	12.600.000

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam belanja modal TA 2016, terdapat pengeluaran belanja modal untuk keperluan pembayaran tunggakan tahun anggaran yang lalu dengan rincian sebagai berikut:

No	No SP2D (Akun)	Jumlah	Tanggal SP2D
1	161821302013265 (532111)	407.990.000	Senin, 23 Mei 2016
2	161821302020406 (532111)	167.361.500	Rabu, 29 Juni 2016
	Total	575.351.500	

Pada tahun 2016 terdapat belanja modal peralatan dan mesin yang tidak berhasil ditagihkan, sehingga menjadi Hutang Pihak Ketiga (Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar) pada tahun anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

No	No SPM (Akun)	Jumlah	Keterangan
1	01589 (532111)	183.332.000	Extention Delegate
2	03929 (532111)	8.016.000	Pengadaan workstation
	Total	191.348.000	

Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Rp15.308.094.550,00

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan s.d 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing masing sebesar Rp15.308.094.550,00 dan Rp35.999.742.638,00 atau mengalami penurunan sebesar -57,48 persen. Penurunan ini disebabkan oleh masih belum dapat dilaksanakannya berbagai pekerjaan penambahan aset gedung dan bangunan antara lain pembangunan alun-alun demokrasi, pengembangan gedung DPR RI dan Poliklinik.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan s.d 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2016	Realisasi s.d 31 Desember 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.448.033.000	5.752.421.338	(74,83)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	13.860.061.550	30.247.321.300	(54,18)
Jumlah Belanja Kotor	15.308.094.550	35.999.742.638	(57,48)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	15.308.094.550	35.999.742.638	(57,48)

Dari belanja modal sebesar Rp15.308.094.550,00 hanya sebesar Rp13.753.351.500,00 yang membentuk gedung dan bangunan. Sebesar Rp1.554.743.050,00 teridentifikasi sebagai Peralatan dan Mesin, Jalan Irigasi dan jaringan serta digunakan untuk pembayaran tunggakan tahun anggaran yang lalu, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2016
Total Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.308.094.550
- Teridentifikasi sebagai Gedung dan Bangunan	13.753.351.500
Teridentifikasi sebagai:	1.554.743.050
- Peralatan dan Mesin	499.727.350
- Jalan Irigasi Jaringan	466.752.000
- Pembayaran Tunggakan	588.263.700

Pada Tahun 2015, Terdapat belanja modal Gedung dan Bangunan atas pelaksanaan Pemasangan Pagar Pohon Taman DPR RI senilai Rp167.361.500,00 dan Renovasi Toilet Gedung DPR RI senilai Rp588.263.700,00 yang belum terbayar dan tercatat sebagai hutang kepada pihak ketiga dalam neraca. Pada TA 2016, atas tunggakan senilai Rp588.263.700,00 telah dibayarkan dengan nomor SP2D nomor 161821302016600 tertanggal 10 Juni 2016. Namun demikian, atas tagihan senilai Rp167.361.500,- dibayarkan dengan menggunakan belanja modal peralatan dan mesin.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp843.265.531,00

B.5.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan s.d 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing masing sebesar Rp843.265.531,00 dan Rp169.770.700,00 atau mengalami kenaikan sebesar 396,71 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya pembelian dan pengembangan jaringan transmisi yang merupakan upaya untuk pengembangan jaringan pada Gedung Nusantara III, gedung mekanik dan press room nusantara III dan pengembangan Jaringan Kabel Fiber Optic

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan s.d 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2016	Realisasi s.d 31 Desember 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Irigasi	127.261.000	169.770.700	-25,04
Belanja Penambahan Nilai jaringan	716.004.531	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	843.265.531	169.770.700	396,71
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	843.265.531	169.770.700	396,71

Dari belanja modal sebesar Rp843.265.531,00 seluruhnya sebesar Rp836.115.531,00 yang teridentifikasi sebagai Jalan, Irigasi dan jaringan. dan sebesar Rp7.150.000,00 teridentifikasi sebagai aset Peralatan dan Mesin.

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2016
Total Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	843.265.531
- teridentifikasi sebagai Jalan, Irigasi dan Jaringan	836.115.531
Teridentifikasi sebagai aset lain:	7.150.000
- Sebagai Peralatan dan Mesin	7.150.000

Terdapat belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dilakukan dengan belanja modal Peralatan dan Mesin senilai Rp954.640.150,00 dan dengan menggunakan belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp466.752.000,00

Belanja Modal Lainnya
Rp990.969.920,00

B.5.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya s.d 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing masing sebesar Rp990.969.920,00 dan Rp3.163.718.178,00 atau mengalami penurunan sebesar 68,68 persen. Penurunan ini disebabkan masih belum dapat dilaksanakannya berbagai pekerjaan penambahan aset tetap lainnya antara lain, pembuatan film edukasi DPR, Aplikasi untuk TV Parlemen, serta pengadaan Software-Editing Video, serta belum dapat dilaksanakannya pembangunan Sistem Manajemen Aset

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya s.d 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2016	Realisasi s.d 31 Desember 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	990.969.920	3.163.718.178	-68,68
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya/Aset lainnya	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	990.969.920	3.163.718.178	-68,68
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	990.969.920	3.163.718.178	-68,68

Dari belanja modal sebesar Rp990.969.920,00 hanya sebesar Rp780.907.920,00 yang teridentifikasi sebagai Aset Tetap lainnya atau Aset lainnya. Sebesar Rp210.062.000,00 teridentifikasi sebagai belanja barang, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2016
Total Belanja Modal Lainnya	990.969.920
- teridentifikasi sebagai Aset Tetap lainnya atau Aset lainnya	780.907.920
Teridentifikasi sebagai aset lain:	210.062.000
- Teridentifikasi Belanja Barang	210.062.000

C. PENJELASAN ATAS POS POS NERACA

Kas Di Bendahara
Penerimaan
Rp1.229.306.400,00

C.1 Kas Di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing masing sebesar Rp1.229.306.400,00 dan Rp308.722,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Atas saldo tahun anggaran 2015 sebesar Rp308.722,00 telah dilakukan penyetoran pada tahun anggaran 2016 dengan nomor NTPN AFA3C3FHL2QSRHI8 tanggal 21 April 2016

Atas saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.229.306.400,00 telah dilakukan penyetoran pada 6 Februari 2017 dengan NTPN 8AD328378GKJQHV8. Saldo ini merupakan kekurangan pembayaran sewa kantor oleh PT Bank Mandiri Persero yang baru diketahui ada di rekening bendahara penerimaan setelah tanggal pelaporan.

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0.000,00

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing masing sebesar Rp0,00 dan Rp25.280.013,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Gaji dan Honor Yang Belum Disalurkan	-	25.280.013
Potongan Pajak Bendahara yang belum disetorkan	-	-
Total		25.280.013

Atas saldo Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp25.280.013,00 telah dilakukan penyetoran dengan NTPN 0B85D5J1AEPGAPOO sebesar Rp18.027.096,00 dan NTPN A5FE56AQOOM057K8 sebesar Rp7.252.917,00. Penyetoran kembali ke kas negara disebabkan Tenaga Ahli yang dimaksud tidak dapat dihubungi kembali.

Piutang Bukan Pajak
Rp416.058.291,00

C.3 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2016 Nomor: NK-03/PB.6/2017 adalah masing masing sebesar Rp416.058.291,00 dan Rp2.798.456.877,00.

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Piutang PNB		
Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	323.109.691	390.326.429
Piutang Pemanfaatan BMN (Berupa Sewa)	67.250.000	110.935.000
Piutang (Pencatatan Bank Garansi Dicalirkan KPPN)	-	1.817.566.849
Piutang Kelebihan Pembayaran Honor (Belanja Barang)	-	11.879.924
Piutang Kelebihan Belanja Perjalanan Dinas	-	336.779.630
Biaya Penggantian Atas Tidak Memenuhi Masa Kerja 5 Tahun	25.000.000	25.000.000
Piutang Lainnya		
Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	698.600	32.159.595
Piutang Pemanfaatan BMN (Berupa Sewa)	-	73.809.450
Total	416.058.291	2.798.456.877

Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, terdapat penambahan saldo Piutang PNBP yang disebabkan adanya penambahan pada piutang atas sewa warung yang hingga periode pelaporan belum dibayarkan oleh penyewa sebesar Rp46.450.000,00. Atas saldo piutang pemanfaatan BMN berupa warung yang merupakan saldo piutang TA 2015, telah dilakukan penagihan sebanyak 3 (tiga) kali melalui surat penagihan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga).

Selain koreksi tersebut, tidak terdapat penambahan atas saldo piutang PNBP dan Piutang Lainnya yang tercatat pada Neraca Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Piutang Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS merupakan kejadian setelah tanggal neraca yang dianggap mempengaruhi laporan keuangan. Kecuali saldo pada Piutang Lainnya sebesar Rp698.600,00 seluruh Piutang PNBP yang tercatat telah disetorkan pada bulan Januari dan Februari 2017 dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian	Tanggal Setor	Jumlah
1	NTPN 0878035L6VRO9H3O (Kelebihan Tunkin)	3 Januari 2017	10.350.620
2	NTPN B772635KP0QKK13O (Kelebihan Tunkin)	3 Januari 2017	203.266.885
3	NTPN ABE8535LPJT7RH3O (Kelebihan Tunkin)	3 Januari 2017	27.331.000
4	NTPN 6181C11CIJ2E0KCO (Kelebihan Tunkin)	17 Februari 2017	469.431
5	NTPN A4D681JIDSN326CO (Kelebihan Tunkin)	17 Februari 2017	38.520.755
6	NTPN C4A9E3OG2OB6NB39 (Kelebihan Tunkin)	14 Februari 2017	43.171.000
	Total		323.109.691

Rincian Mutasi Tambah dan Kurang atas Piutang PNBP adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai	Nilai
Saldo Per 31 Desember 2015		2.798.456.877
Mutasi Kurang		(2.752.656.877)
1. Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS		(390.326.429)
a. Dipotong langsung pada saat pengajuan SPM (Dajukan Netto)	280.538.391	
b. Dajukan melalui potongan SPM (SPM 00006 dan 00011)	1.564.926	
b. Disetorkan melalui SSBP (daftar terlampir)	108.223.112	
2. Piutang Pemanfaatan BMN		(90.135.000)
a. Pelunasan Piutang Warung	54.510.000	
b. Pelunasan Piutang BCA (NTPN 3D94A1O89JUSFI69)	35.625.000	
3. Piutang Pencalran Bank Garansi oleh KPPN		(1.817.566.849)
a. Dicalirkan dengan NTPN 1013020215030313	1.409.576.849	
b. Dicalirkan dengan NTPN 0115080315140414	407.990.000	
4. Piutang PNBP Lain-lain		(348.659.554)
a. Piutang Kelebihan Pemberian Honor (Daftar terlampir)	11.879.924	
b. Piutang kelebihan belanja peradilan (Daftar terlampir)	336.779.630	
c. Piutang tidak memenuhi masa kerja	-	
5. Piutang Lain-lain		(105.969.045)
a. Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	32.159.595	
b. Piutang Pemanfaatan BMN (Sewa Balturrahman)	73.809.450	
Mutasi Tambah		370.258.291
1. Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	323.109.691	
2. Penambahan Piutang Pemanfaatan BMN (Piutang Warung)	46.450.000	
3. Piutang Kelebihan Tunkin (Belum Disetorkan)	698.600	
Saldo Per 31 Desember 2016		416.058.291

Atas piutang berupa biaya penggantian atas tidak memenuhi masa kerja 5 (lima) tahun telah dilakukan usaha-usaha untuk melakukan penagihan, namun demikian, setelah dilakukan berbagai upaya penagihan yang dilakukan, piutang tersebut tidak berhasil diterima pembayarannya. Atas hal tersebut, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Surat Nomor: IU/20758/SETJEN DPR RI/11/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Usulan untuk tidak dapat ditindaklanjuti menyimpulkan bahwa piutang kepada pihak tersebut statusnya tidak dapat ditindaklanjuti dan dapat dinyatakan selesai. Penghapusan atas piutang ini akan dikoordinasikan dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada TA 2017.

Atas penagihan piutang warung dan penagihan penggantian atas tidak memenuhi masa kerja, telah dilakukan perubahan status piutang dari lancar menjadi diragukan. Perubahan status piutang tidak dilakukan menjadi macet karena belum dilimpahkan ke Kementerian Keuangan.

Bagian Lancar TP/TGR
Rp250.000.000,00

C.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing masing sebesar Rp250.000.000,00 dan Rp250.000.000,00.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per 31 Desember 2016

Nama	31 Desember 2016	31 Desember 2015
SS	250.000.000	250.000.000
Total	250.000.000	250.000.000

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih-Piutang Jangka
Pendek Rp26.001.291,46

C.5 Penyisihan Piutang Tak tertagih - Piutang Jangka Pendek

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2016 Nomor: NK-03/PB.6/2017 adalah masing masing sebesar Rp26.001.291,00 dan Rp15.242.282,00.

Penyisihan piutang tak tertagih-jangka pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	370.258.291	0,50%	1.851.291
Diragukan	45.800.000	50%	22.900.000
Jumlah	416.058.291		24.751.291
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	250.000.000	0,50%	1.250.000
Kurang Lancar	-	10%	-
Jumlah	250.000.000		1.250.000
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	666.058.291		26.001.291

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, terdapat perubahan atas saldo penyisihan yang disebabkan adanya penambahan pada piutang PNBP yang bersumber dari Piutang pemanfaatan BMN berupa Warung atas periode sewa selama TA 2016.

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2016 mengalami kenaikan, walaupun jumlah piutang berkurang jika dibandingkan dengan periode TA 2015. Hal ini disebabkan adanya penurunan kualitas piutang PNBP dari sebelumnya berkualitas lancar menjadi diragukan atas piutang PNBP berupa pemanfaatan BMN warung periode TA 2015 yang tidak dilunasi setelah melalui 3 (tiga) kali penagihan.

Persediaan
Rp17.329.224.807,00

C.6 Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2016 Nomor: NK-03/PB.6/2017 adalah masing masing sebesar adalah masing masing sebesar Rp17.329.224.807,00 dan Rp15.816.778.150,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Barang Konsumsi	11.091.032.419	10.747.251.533
Bahan untuk Pemeliharaan	1.683.023.822	769.233.164
Suku Cadang	451.961.310	436.793.707
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	2.481.778.004	1.822.125.340
Bahan Baku	128.111.483	116.942.618
Persediaan Lainnya	1.493.317.769	1.924.431.788
Total	17.329.224.807	15.816.778.150

Perubahan atas saldo persediaan berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final disebabkan adanya koreksi atas kesalahan pencatatan persediaan melalui menu transfer keluar. Setelah melalui penelusuran, diketahui bahwa terjadi kesalahan penginputan persediaan, sehingga menyebabkan adanya perubahan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Suku Cadang	1.341.120	
Bahan Baku	8.776.240	
Bahan Untuk Pemeliharaan	660.000	
Beban Persediaan Suku Cadang	556.600	
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	45.375	
Transfer Keluar		11.273.515
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		105.820

Adanya penambahan pada saldo persediaan disebabkan adanya pencatatan ganda pada pemakaian dan transfer keluar, sehingga perlu untuk menghapus salah satu pengurangan tersebut. Penambahan pada saldo beban disebabkan adanya pencatatan pemakaian melalui menu transfer. Pemakaian melalui menu transfer menyebabkan tidak tercatatnya beban persediaan. Sedangkan penambahan pendapatan penyesuaian nilai persediaan disebabkan adanya koreksi otomatis atas penyesuaian nilai persediaan akibat pemakaian prinsip harga perolehan terakhir pada aplikasi persediaan.

Rincian Realisasi Belanja Persediaan dapat disajikan dalam rincian berikut:

Persediaan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	32.623.006.735	34.333.825.490
Belanja Barang Persediaan Lainnya	6.981.032.318	6.534.081.091
Belanja Barang Persediaan pemeliharaan Gedung dan	201.228.000	-
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	140.190.240	87.572.749
Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	165.000.000	253.110.000
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	11.198.552.300	-
Total	51.309.009.593	41.208.589.330

Dari belanja persediaan sebesar Rp51.309.009.593,00 hanya sebesar Rp51.247.461.667,00 yang membentuk persediaan. Sebesar Rp172.026.976,00 teridentifikasi sebagai aset dan belanja barang operasional lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2016
Total Belanja Persediaan	51.309.009.593
- Teridentifikasi sebagai Persediaan	51.247.461.667
Teridentifikasi sebagai:	172.026.976
- Aset	154.158.585
- Belanja Barang Operasional	17.868.391
Belanja Persediaan dengan Akun Selain Persediaan:	110.479.050
- Dengan Belanja Modal	110.479.050
Belanja Persediaan Bersih	51.247.461.667

Pada semester II Tahun Anggaran 2016 UAKPB Sekretariat Jenderal DPR RI mengusulkan jumlah persediaan yang rusak/usang dan telah diusulkan penghapusan sebesar Rp904.729.154,00 yang tertuang dalam Surat Kepala Biro Barang Milik Negara Nomor: DA/14696/SETJEN DPR RI/PB.01/09/2016 tanggal 2 September 2016 perihal Usulan Persetujuan pemusnahan barang-barang persediaan tahun 2009 - 2015 yang telah rusak/kadaluarsa/usang di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Tanah
Rp188.409.157.000,00

C.7 Tanah

Saldo Tanah Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing masing sebesar Rp188.409.157.000,00 dan Rp188.409.157.000,00.

Rincian mutasi aset tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2015	188.409.157.000
Mutasi Tambah	-
-	-
Mutasi Kurang	-
-	-
Saldo Per 31 Desember 2016	188.409.157.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2016	188.409.157.000

Saldo tanah tercatat merupakan Tanah yang dimiliki pada beberapa Komplek Perumahan Pegawai, antara lain kompleks DPR RI Kemanggisan, Komplek DPR RI Kebon Jeruk, Komplek DPR RI Kelapa Dua, Komplek DPR RI Meruya, serta Wisma Griya Sabha Kopo. Selain itu terdapat pada Komplek Rumah Jabatan Anggota di Ulujami.

Peralatan dan Mesin
Rp1.072.262.010.157,00

C.8 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2016 Nomor: NK-03/PB.6/2017 adalah masing masing sebesar Rp1.072.262.010.157,00 dan Rp976.553.364.837,00.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, terdapat penambahan pada peralatan dan mesin sebesar Rp300.150.049,00 yang disebabkan adanya belanja pemeliharaan yang dapat dikapitalisasikan. Atas belanja pemeliharaan yang dikapitalisasikan kedalam peralatan dan mesin, telah dilakukan penyesuaian dengan mengkredit beban pemeliharaan yang terkait pada laporan operasional. Rincian nilai beban pemeliharaan dikapitalisasi sebagai aset disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	198.873.188
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	10.005.721
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	79.770.735
4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.500.405
	Total	300.150.049

Dari nilai tersebut, sebesar Rp285.142.545,00 diinput melalui menu pembelian, sebesar Rp11.596.196,00 diinput melalui menu pengembangan, dan sebesar Rp3.411.308,00 diinput melalui menu koreksi nilai.

Rincian mutasi peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2015	166.477	976.553.364.837
Mutasi Tambah	22.285	133.071.430.026
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	-	617.051.646
Pembelian	19.017	110.145.538.063
Pengembangan Nilai Aset	-	16.482.984.907
Pembatalan Penghapusan	37	3.963.963.740
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1	6.596.800
Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	3.230	1.855.294.870
Mutasi Kurang	(6.988)	(37.362.784.706)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(6.988)	(37.362.784.706)
Saldo Per 31 Desember 2016	181.774	1.072.262.010.157
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	-	713.339.188.584
Nilai Buku Per 31 Desember 2016		358.922.821.573

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+) sebesar Rp617.051.646,00 yang dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
1	ALAT BESAR	-	12.847.644
2	ALAT ANGKUTAN	-	1.850.772
3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	12.214.798
4	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	-	501.190.546
5	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	-	14.013.742
6	ALAT LABORATORIUM	-	8.400.000

No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
7	ALAT PERSENJATAAN	-	3.360.000
8	KOMPUTER	-	50.141.544
9	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	13.032.600
	Total		617.051.646

2. Pembelian sebesar Rp110.145.538.063,00 dengan kuantitas 19.017 buah yang terdiri atas:

No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
1	PERALATAN OLAH RAGA	5	213.370.200
2	ALAT BESAR	84	3.526.963.603
3	ALAT ANGKUTAN	82	8.492.533.484
4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	113	634.316.574
5	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	15.444	63.947.922.152
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	1.171	5.902.016.963
7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	170	6.452.659.451
8	ALAT LABORATORIUM	67	1.188.541.876
9	ALAT PERSENJATAAN	155	540.799.400
10	KOMPUTER	1.406	14.311.843.110
11	ALAT KESELAMATAN KERJA	319	4.800.517.700
12	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	134.053.550
	Total	19.017	110.145.538.063

3. Pengembangan nilai aset sebesar Rp16.482.984.907,00 dengan kuantitas nihil yang terdiri atas:

No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
1	ALAT BESAR	-	4.914.199.554
2	ALAT ANGKUTAN	-	182.764.115
3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	20.381.461
4	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	-	10.910.207.354
5	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	-	17.375.119
6	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	-	64.505.800
7	ALAT LABORATORIUM	-	31.538.604
8	KOMPUTER	-	39.830.000
9	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	293.027.450
10	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	9.155.450
	Total		16.482.984.907

4. Pembatalan penghapusan sebesar Rp3.963.963.740,00 dengan kuantitas 37, buah yang terdiri atas:

No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
1	ALAT ANGKUTAN	36,00	3.568.788.740
2	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	1,00	395.175.000
	Total	37,00	3.963.963.740

5. Perolehan Reklasifikasi dari Ekstra ke Intra sebesar Rp1.855.294.870,00 dengan kuantitas 3230, buah yang terdiri atas:

No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
1	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	3.030,00	1.317.834.870
2	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	200,00	537.460.000
	Total	3.230,00	1.855.294.870

6. Penghentian Aset Dari Penggunaan adalah sebesar -Rp37.362.784.706,00 dengan kuantitas -6.988 buah yang terdiri atas:

No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
1	ALAT ANGKUTAN	(92)	(7.084.087.080)
2	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	(5.914)	(23.972.494.815)
3	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	(125)	(614.248.542)
4	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	(1)	(27.225.000)
5	ALAT LABORATORIUM	(10)	(21.300.920)
6	KOMPUTER	(846)	(5.643.428.349)
	Total	(6.988)	(37.362.784.706)

Selain mutasi-mutasi tersebut, terdapat mutasi tambah yang berasal dari Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap yang berupa Alat Angkutan sebesar Rp6.596.800,00.

Sebagaimana telah disebutkan, selama tahun anggaran 2016, terdapat belanja modal yang dikeluarkan dalam rangka pelunasan atas tunggakan pekerjaan tahun 2015. Pembayaran tunggakan tersebut tidak dicatat kembali dalam SIMAK karena seluruh pekerjaan sudah dicatat pada SIMAK TA 2015. Rincian pembayaran tunggakan pekerjaan adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai SPM
1	Pekerjaan Perbaikan Lift dengan SPM Nomor 02399 dicairkan dengan SP2D 161821302013265 tanggal 23 Mei 2016	Rp407.990.000
2	Pekerjaan Pemasangan Pagar Tanaman dengan SPM Nomor 02491 dicairkan dengan SP2D 161821302020406 tanggal 29 Juni 2016	Rp167.361.500
	Total	Rp575.351.500

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp873.425.270.646,00

C.9 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2016 Nomor: NK-03/PB.6/2017 adalah masing masing sebesar Rp873.425.270.646,00 dan Rp848.056.166.736,00.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, terdapat penambahan pada gedung dan bangunan sebesar Rp726.046.696,00 yang disebabkan adanya belanja pemeliharaan yang dapat dikapitalisasikan serta koreksi atas kesalahan penggunaan akun pengembalian belanja modal Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL). Atas belanja pemeliharaan yang dikapitalisasikan kedalam peralatan dan mesin, telah dilakukan penyesuaian dengan mengkredit beban pemeliharaan yang terkait pada laporan operasional. Telah dilakukan pula reklasifikasi akun pengembalian belanja modal TAYL (423953) ke akun Pendapatan

Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemerintah (423752). Rincian nilai beban pemeliharaan dikapitalisasi sebagai aset serta reklasifikasi akun pendapatan disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	361.704.000
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	191.342.696
3	Reklas Akun PNPB dari 423953 ke akun 423752	173.000.000
	Total	726.046.696

Dari nilai tersebut, sebesar Rp525.394.360,00 diinput melalui menu pengembangan, dan sebesar Rp200.652.336,00 diinput melalui menu koreksi nilai.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2015	259	848.056.166.736
Mutasi Tambah	18	25.407.571.265
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	-	966.921.623
Pembelian	18	2.346.412.510
Pengembangan Nilai Aset	-	22.094.237.132
Mutasi Kurang	-	(38.467.355)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-	(38.467.355)
Saldo Per 31 Desember 2016	277	873.425.270.646
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	-	135.554.504.605
Nilai Bersih Per 31 Desember 2016		737.870.766.041

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+) sebesar Rp966.921.623,00 yang dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
1	BANGUNAN GEDUNG	-	936.729.023
2	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	30.192.600
	Total		966.921.623

2. Pembelian sebesar Rp2.346.412.510,00 dengan kuantitas 018 buah yang terdiri atas:

No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
1	BANGUNAN GEDUNG	13	1.812.653.110
2	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	5	533.759.400
	Total	18	2.346.412.510

2. Pengembangan sebesar Rp22.094.237.132,00 dengan kuantitas 000 buah yang terdiri atas:

No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
1	BANGUNAN GEDUNG	-	22.094.237.132
	Total		22.094.237.132

Sebagian pengembangan nilai tersebut diperoleh atas penyelesaian pembayaran

tunggakan TA 2015 pada tahun 2016. Sebagian aset yang telah dibayar pada TA 2016 sebelumnya telah dicatat dalam KDP pada TA 2015.

Selain mutasi bertambah, terdapat mutasi berkurang yang berasal dari Koreksi Pencatatan Nilai (-) sebesar -Rp42.020.690,00 yang merupakan koreksi atas bangunan gedung. Koreksi tersebut disebabkan adanya pendapatan pengembalian belanja modal (423953) yang dilakukan pada TA 2016 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai SPM
1	Pekerjaan pembangunan parkir Motor DPR (NTPN No.E2F400112R08LADP tanggal 31/03/2016)	Rp33.467.355
2	Kelebihan Pembayaran pekerjaan perbaikan toilet lantai 17 dan 18 nusantara I TA 2011 & 2012 (NTPN No.86F6A6EFBS7T71MP tanggal 13/12/2016)	Rp3.553.335
3	Kelebihan pembayaran pekerjaan lapangan olahraga di Jantung Sehat (NTPN No.57D085CI4JPGPHTN9 tanggal 30/12/2016)	Rp5.000.000
Total		Rp42.020.690

Pada TA 2016 terdapat belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp588.263.700,00 Nomor SPM 02380 dengan SP2D Nomor 161821302016600 yang merupakan pembayaran atas tunggakan belanja modal TA 2015. Atas belanja tersebut, tidak dilakukan pencatatan kembali pada SIMAK-BMN 2016 karena aset sudah dicatat pada TA 2015

Seluruh Gedung dan Bangunan tercatat merupakan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan telah melalui pembagian dengan DPD dan MPR. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp80.700.987.120,00

C.10 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Aseri Final Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2016 Nomor: NK-03/PB.6/2017 adalah masing masing sebesar Rp80.700.987.120,00 dan Rp76.687.829.174,00.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, terdapat penambahan pada Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.755.650.265,00 yang disebabkan adanya belanja pemeliharaan yang dapat dikapitalisasikan. Atas belanja pemeliharaan yang dikapitalisasikan kedalam peralatan dan mesin, telah dilakukan penyesuaian dengan mengkredit beban pemeliharaan yang terkait pada laporan operasional. Rincian nilai beban pemeliharaan dikapitalisasi sebagai aset disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	Dicatat Sebagai	Jumlah
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Irigasi	164.621.000
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Jalan dan Jembatan	499.060.000
3	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jalan dan Jembatan	977.900.000
4	Beban Pemeliharaan Jaringan	Jaringan	114.069.265
Total			1.755.650.265

Seluruh koreksi tersebut dicatat melalui menu pengembangan pada Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Jaringan.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2015	4.979	76.687.829.174
Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan	8	1.941.612.000
Pembelian	3	366.150.900
Pengembangan Nilai Aset	5	1.575.461.100
Mutasi Tambah Irigasi	2	468.782.000
Pembelian	2	286.957.950
Pengembangan Nilai Aset	-	181.824.050
Mutasi Tambah Jaringan	11	1.602.763.946
Pembelian	11	1.450.568.081
Pengembangan Nilai Aset	-	152.195.865
Mutasi Kurang	-	-
-	-	-
Saldo Per 31 Desember 2016	5.000	80.700.987.120
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	-	32.078.360.710
Nilai Buku Per 31 Desember 2016		48.622.626.410

Mutasi Tambah yang berasal dari Pembelian adalah sebesar Rp2.103.676.931,00 dengan kuantitas 016 buah dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
1	JALAN DAN JEMBATAN	3	366.150.900
2	BANGUNAN AIR	2	286.957.950
3	INSTALASI	2	293.021.800
4	JARINGAN	9	1.157.546.281
	Total	16	2.103.676.931

Mutasi Tambah yang berasal dari Pengembangan Nilai Aset adalah sebesar Rp1.909.481.015,00 dengan kuantitas 005 buah dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
1	JALAN DAN JEMBATAN	5	1.575.461.100
2	BANGUNAN AIR	-	181.824.050
3	INSTALASI	-	131.591.465
4	JARINGAN	-	20.604.400
	Total	5	1.909.481.015

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan per disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp19.024.016.706,00

C.11 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing masing sebesar Rp19.024.016.706,00 dan Rp18.924.576.786,00.

Saldo tersebut terdiri atas Aset Tetap Renovasi dan Aset Tetap Lainnya. Saldo Aset

Tetap Renovasi selama TA 2016 tidak mengalami mutasi bertambah maupun mutasi berkurang. Mutasi transaksi terhadap aset tetap lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2015	98.486	18.924.576.786
Mutasi Tambah	766	99.439.920
Pembelian	766	99.439.920
Mutasi Kurang	-	-
Saldo Per 31 Desember 2016	99.252	19.024.016.706
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	-	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2016		19.024.016.706

Mutasi tambah aset tetap lainnya keseluruhannya berasal dari pembelian buku buku perpustakaan (Bahan Perpustakaan Tercetak).

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp329.911.400,00

C.12 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo konstruksi dalam pengerjaan Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing masing sebesar Rp329.911.400,00 dan Rp18.194.294,551,00.

Konstruksi dalam pengerjaan merupakan pembangunan gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2015		18.194.294.551
Mutasi Tambah	-	-
Mutasi Kurang	-	(17.864.383.151)
- Sudah menjadi aset definitif	-	(17.864.383.151)
Saldo Per 31 Desember 2016		329.911.400
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	-	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2016		329.911.400

Adanya mutasi kurang dalam KDP disebabkan adanya penyelesaian KDP yang dicatat pada TA 2015 hasil koreksi BPK. Koreksi pada TA 2015 disebabkan adanya pencairan bank garansi yang dilakukan oleh KPPN akibat belum dapat diselesaikannya pekerjaan oleh pihak ketiga sesuai dengan batas waktu penyelesaian yang telah ditetapkan. Sebagaimana diketahui, setiap pengadaan dengan jatuh tempo penyelesaian pekerjaan pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, wajib melampirkan jaminan pelaksanaan (Garansi Bank) pada saat mengajukan pencairan dana akhir tahun anggaran.

Berdasarkan keterangan yang dikumpulkan dari unit kerja, dari 8 (delapan) pekerjaan yang tercatat dalam KDP, sebanyak 5 pekerjaan dapat diusulkan untuk dihapuskan secara permanen (menunggu hasil konsultasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara), sedangkan 3 pekerjaan lainnya masih menunggu konfirmasi dari unit kerja. Rincian KDP yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai	Status
1	Konsultan Perencana Pembuatan Sprinkler Taman	35.661.000	Akan Dihapuskan
2	Angsuran 80% konsultan perencana penggantian pagar batas taman ria Komplek DPR RI	36.388.000	Akan Dihapuskan
3	Konsultan Perencana Perbaikan Ruang Kerja Anggota	66.422.400	Akan Dihapuskan
4	Konsultan Perencana Renovasi Toilet Nus I DPR RI	32.912.000	Akan Dihapuskan

No	Uraian	Nilai	Status
5	Konsultan Perencana Mekanikal Elektrikal Transportasi	46.593.000	Konfirmasi Unit Kerja
6	Konsultan Perencana Arsitektur dan Struktur Transportasi	29.191.000	Konfirmasi Unit Kerja
7	Konsultan Perencana Rehabilitasi Sistem Kebakaran	46.532.000	Konfirmasi Unit Kerja
8	Konsultan Perencana Revitalisasi Saluran	36.212.000	Akan Dihapuskan
Total		329.911.400	

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp880.972.053.899,00

C.13 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2016 Nomor: NK-03/PB.6/2017 adalah masing masing sebesar Rp880.972.053.899,00 dan Rp771.289.028.531,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, terdapat penambahan pada akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp245.008.040,00 yang disebabkan penambahan peralatan dan mesin dari belanja pemeliharaan yang dapat dikapitalisasikan. Atas belanja pemeliharaan yang dikapitalisasikan kedalam peralatan dan mesin, telah dilakukan penyesuaian dengan mengkredit beban pemeliharaan yang terkait pada laporan operasional. Rincian penambahan akumulasi penyusutan sebagai akibat penambahan aset tetap disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	Status	Jumlah
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Bertambah	42.804.952
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan	Bertambah	17.730.201
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, iriasi dan jaringan	Bertambah	184.472.887
Total			245.008.040

Walaupun terjadi penambahan sebesar Rp245.008.040,00 pada akumulasi penyusutan, hanya terjadi penambahan sebesar Rp237.179.949,00 pada beban Penyusutan. Hal tersebut disebabkan adanya penambahan peralatan dan mesin melalui koreksi nilai, sehingga diakomodir pada Laporan Perubahan Ekuitas pada akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp7.828.091,00.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016. Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	1.072.262.010.157	713.339.188.584	358.922.821.573
Gedung dan Bangunan	873.425.270.846	135.554.504.605	737.870.766.041
Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan	80.700.987.120	32.078.360.710	48.622.626.410
Total	2.026.388.267.923	880.972.053.899	1.145.416.214.024

Aset Tak Berwujud
Rp37.876.312.745,00

C.14 Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing masing sebesar Rp37.876.312.745,00 dan Rp35.075.265.637,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara

umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	Software	24.685.345.582
2	Lisensi	1.187.684.800
3	Hasil Kajian/Penelitian	9.499.779.000
4	Aset Tak Berwujud Lainnya	2.503.503.563
	Jumlah Nilai perolehan per 31 Desember 2016	37.876.312.745
	Amortisasi ATB s.d 31 Desember 2016	18.414.853.441
	Total	19.461.459.304

Rincian Mutasi Bertambah Aset Tak Berwujud dijabarkan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2015	546	35.075.265.637
Mutasi Tambah dan Kurang Software	(133)	2.671.856.008
Pembelian	13	3.383.688.000
Pengembangan Nilai Aset	-	3.780.000
Koreksi Pencatatan	(146)	(715.611.992)
Mutasi Tambah dan Kurang Lisensi	18	129.191.100
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	-	1.260.000
Pembelian	36	170.209.600
Koreksi Pencatatan	(18)	(42.278.500)
Saldo Per 31 Desember 2016	431	37.876.312.745
Amortisasi ATB s.d 31 Desember 2016	-	18.414.853.441
Nilai Buku Per 31 Desember 2016		19.461.459.304

Pembelian terbesar pada Aset Tak Berwujud diantaranya adalah pembelian Aplikasi Notula Pengelola Rapat dan Aplikasi Notula Transkriptor yang mencapai Rp2.706.000.000,00. Pembelian lainnya antara lain pembelian berbagai software Office dan Software Editing, pengembangan Aplikasi Mobile DPR RI serta pengadaan aplikasi Standarisasi Harga Setjen DPR RI.

Aset Lain-lain
Rp14.637.981.852,00

C.15 Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing masing sebesar Rp14.637.981.852,00 dan Rp14.297.767.460,00.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2015	53	14.297.767.460
Mutasi Tambah	6.988	37.362.784.706
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lain	6.988	37.362.784.706
Mutasi Kurang	(7.003)	(37.022.570.314)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(7.003)	(37.015.973.514)
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan	(1)	(6.596.800)
Saldo Per 31 Desember 2016	38	14.637.981.852
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	-	3.546.257.475
Nilai Buku Per 31 Desember 2016		11.091.724.377

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transaksi penambahan berupa Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lain dengan kuantitas 6.988 buah senilai Rp37.362.784.706,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
1	ALAT ANGKUTAN	92	7.084.087.080
2	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	5.914	23.972.494.815
3	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	125	614.248.542
4	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1	27.225.000
5	ALAT LABORATORIUM	10	21.300.920
6	KOMPUTER	846	5.643.428.349
	Total	6.988	37.362.784.706

2. Transaksi pengurangan berupa Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola dengan kuantitas -7.003 buah senilai -Rp37.015.973.514,00 dengan rincian dibawah ini. Seluruh informasi terkait BA Usulan Penghapusan tersedia dalam lampiran LK ini.

No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
1	ALAT ANGKUTAN	(92)	(7.084.087.080)
2	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	(5.914)	(23.972.494.815)
3	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	(124)	(219.073.542)
4	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	(1)	(27.225.000)
5	ALAT LABORATORIUM	(10)	(21.300.920)
6	KOMPUTER	(862)	(5.691.792.157)
	Total	(7.003)	(37.015.973.514)

Selain mutasi tambah dan kurang tersebut, terdapat mutasi kurang yang disebabkan adanya penggunaan kembali BMN yang telah dihentikan senilai Rp6.596.800,00 dengan kuantitas 1 buah, yang merupakan BMN dalam kelompok Alat Angkutan.

Dalam saldo aset lain-lain tersebut, terdapat saldo Aset lain-lain yang diinput melalui SAIBA dan tidak diinput melalui SIMAK-BMN senilai Rp1.887.966.208,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok	Harga Perolehan
1	Belanja Modal yang terdefinisi sebagai aset lain-lain pada tahun 2007-2010, yang setelah dilakukan penelusuran dokumen dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan negara masih harus ditindaklanjuti senilai Rp869.187.588,00	869.187.588
	Teridentifikasi sebagai belanja pemeliharaan	337.353.662
	Teridentifikasi sebagai belanja barang	1.448.370
	Teridentifikasi sebagai barang pakai habis	205.700.000
	Belum teridentifikasi	324.685.556
2	Pembayaran Listrik dan Telepon anggota di tahun anggaran 2004 yang tak tertagih, dimana sesuai audit BPK tahun 2006 harus dikategorikan sebagai aset lain-lain senilai Rp1.018.778.620,00	1.018.778.620
	Tunggakan Listrik dan Telepon Anggota Periode 1999 - 2004	610.957.505
	Hasil lelang barang inventaris/kekayaan Negara yang belum dibayar oleh anggota	407.821.115
	Total	1.887.966.208

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp3.546.257.475,00

C.16 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset lainnya Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing masing sebesar Rp21.961.110.916,00 dan Rp2.818.854.835,00.

Pada TA 2016, dengan terbitnya Update aplikasi SIMAK-BMN Versi 16.0 yang telah dapat mengakomodir Amortisasi atas Aset Tak Berwujud, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerapkan amortisasi atas aset tak berwujud. Sehingga nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terdiri atas Akumulasi Penyusutan atas Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi, Akumulasi Amortisasi Software dan Akumulasi Amortisasi Lisensi.

Rincian Akumulasi Amortiasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
Software	24.685.345.582	18.069.363.691	6.615.981.891
Lisensi	1.187.684.600	345.489.750	842.194.850
Aset Lain-lain	12.750.015.644	3.546.257.475	9.203.758.169
Total	38.623.045.826	21.961.110.916	16.661.934.910

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp588.596.166,00

C.17 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo utang kepada pihak ketiga Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing masing sebesar Rp588.596.166,00 dan Rp1.191.268.346,00.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Belanja Pegawai YMH Dibayar	69.379.416	106.255.392
Belanja Barang YMH Dibayar	327.868.750	329.387.754
Belanja Modal YMH Dibayar	191.348.000	755.625.200
Total	588.596.166	1.191.268.346

Selama TA 2016, terdapat pembayaran belanja atas saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2015, baik berupa belanja barang maupun belanja modal senilai Rp1.165.988.333,00 dimana sebesar Rp80.975.379,00 merupakan pembayaran atas tunggakan belanja pegawai, sebesar Rp329.387.754,00 merupakan pembayaran atas tunggakan belanja barang, dan sebesar Rp755.625.200,00 merupakan pembayaran atas tunggakan belanja modal. Seluruh tunggakan belanja pada tahun anggaran 2015 telah selesai dibayarkan.

No	Akun	Jumlah	Keterangan
1	51	80.975.379	Kekurangan Tunkin dan Honor TA
2	52	329.387.754	kesalahan ADK dan Kesalahan SPM
3	53	755.625.200	kesalahan ADK dan Kesalahan SPM
	Total	1.165.988.333	

Berdasarkan rincian tersebut, dari saldo Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp1.191.268.346,00, sebesar Rp25.280.013,00 diselesaikan melalui pengembalian kepada kas negara. Hal tersebut disebabkan tidak diambilnya gaji Tenaga Ahli yang sudah disediakan di Bendahara Pengeluaran. Rincian pengembalian ke kas negara disajikan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Dikembalikan ke kas Negara (NTPN 0B85D5J1AEPGAPOO)	Rp18.027.096
Dikembalikan ke kas Negara (NTPN A5FE56AQOOM057K8)	Rp7.252.917
Total	Rp25.280.013

Rincian utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2016 disajikan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Kekurangan Pembayaran Tunkin TA 2016	Rp69.379.416
CV Anastasia Putri (95%) Perbaikan Pipa Instalasi Komisi (Belanja Barang)	Rp88.695.800
CV Hajarul Rahmat (95%) Pekerjaan Service dan Perbaikan UPS 275KVA (Belanja Barang)	Rp90.158.800
PT Puri Hidayah Mandiri (95%) Pekerjaan Peremajaan Taman (Belanja Barang)	Rp149.014.150
CV Bina Investama (5%) Pemasangan Workstation di Ruang perpustakaan (Belanja Modal)	Rp8.016.000
PT Alfa Cahaya Alam (100%) (Pengadaan dan Pemasangan Extention Kabel Delegate With Voting	Rp183.332.000
Total	Rp588.596.166

Pendapatan Diterima Dimuka
Rp3.391.669.235,00

C.18 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing masing sebesar Rp3.391.669.235,00 dan Rp3.062.983.797,00.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2016
1	ATM BCA	49.875.000
2	Bina Serbaguna	64.278.500
3	BNI ATM	27.317.500
4	BNI ATM Center	99.061.056

No	Uraian	0
5	BNI ATM Kalibata	25.132.100
6	BNI Kantor	89.173.583
7	BRI ATM Center	107.323.667
8	BRI ATM Kalibata	25.132.100
9	Indosat	123.026.000
10	Indosat BTS	127.500.000
11	Jateng Citra Boga	465.568.069
12	Koperasi	-
13	Mac Sarana Jaya	35.416.661
14	Mandiri ATM	38.652.750
15	Mandiri ATM Center	160.985.500
16	Mandiri ATM Kalibata	75.429.959
17	Mandiri ATM Ulujami	21.289.770
18	Mandiri Kantor	874.039.100
19	Masa Depan Bersama	83.948.662
20	Prima Media Selaras	-
21	PT POS	8.679.000
22	Telkomsel	172.140.000
23	XL Antena GSM	699.999.999
24	Risanti	17.700.259
	Total	3.391.669.235

Ekuitas
Rp1.398.950.805.617,00

C.19 Ekuitas

Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2016 Nomor: NK-03/PB.6/2017 adalah masing masing sebesar Rp1.398.950.805.617,00 dan Rp1.416.711.868.152,00

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, terdapat penambahan pada ekuitas sebesar Rp2.593.174.080,00 yang disebabkan adanya perubahan surplus dan defisit, adanya koreksi nilai serta perubahan transaksi antar entitas berupa pengurangan PNBPN dan koreksi transfer keluar. Atas seluruh perubahan tersebut telah dilakukan penyesuaian yang diperlukan, baik pada laporan operasional maupun pada neraca. Rincian penambahan ekuitas disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	Dampak dari	Jumlah
1	Berasal dari pengurangan defisit LO	Perubahan LO	2.415.528.656
2	Berasal dari Koreksi Aset Non Revaluasi	Perubahan Neraca	165.171.909
3	Berasal dari Transaksi Antar Entitas	Perubahan Neraca dan LO	12.473.515
	Total		2.593.174.080

Pendapatan Penerimaan
Bukan Pajak
Rp5.582.236.716,00

D. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak

Saldo Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2016 Nomor: NK-03/PB.6/2017 adalah masing masing sebesar Rp5.582.236.716,00 dan Rp3.417.602.564,00.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, terdapat penambahan pada pendapatan penerimaan bukan pajak sebesar Rp237.712.339,00 yang disebabkan adanya reklasifikasi pendapatan serta adanya penambahan piutang. Rincian perubahan pada pendapatan operasional disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Reklasifikasi dari Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu Ke Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	173.000.000
2	Reklasifikasi dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu Ke Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	18.262.339
3	Penambahan Piutang	46.450.000
	Total	237.712.339

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2016	Realisasi s.d 31 Desember 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.962.577.958	3.308.521.007	49,99%
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	902.314	308.722	192,27%
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	618.756.444	87.484.595	607,27%
Penerimaan Kembali Persekot Uang Muka Gaji	-	6.832.738	-100,00%
Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	-	-	0,00%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	14.455.502	-100,00%
Jumlah	5.582.236.716	3.417.602.564	63,34%

Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan merupakan pendapatan bersifat umum yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka memanfaatkan BMN yang belum digunakan untuk operasional lembaga. Sedangkan pendapatan anggaran lain-lain terdiri atas pendapatan atas denda keterlambatan pembayaran sewa yang dilakukan oleh rekanan.

Dalam pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sudah termasuk pendapatan Sewa PT Bank Mandiri Persero Tbk yang telah masuk kedalam rekening Bendahara Penerimaan pada Agustus 2016, namun baru disetorkan pada TA 2017. Keterlambatan penyetoran disebabkan dilakukannya penyetoran oleh PT Bank Mandiri Persero Tbk kedalam rekening bendahara Penerimaan Satker Dewan atas penerimaan pada Satker Setjen. Atas saldo tersebut, telah dilakukan penyetoran ke kas negara pada tanggal 6 Februari 2017 dengan NTPN 8AD328378GKJQHV8.

Selain adanya penambahan kas di bendahara penerimaan yang belum disetor, nilai Pendapatan Operasional juga sudah melalui penyesuaian yang disebabkan adanya pelunasan dan penambahan piutang serta penambahan dan pengurangan pendapatan diterima dimuka. Rincian mutasi pendapatan operasional disajikan sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan LRA Tahun Anggaran 2016		4.799.416.925
Penyesuaian Tambah (Kredit)		3.194.092.057
a. Mutasi Kurang Pendapatan Diterima Dimuka Periode 2016	1.917.835.657	
b. Mutasi tambah Piutang TA 2016	1.276.256.400	
Penyesuaian Kurang (Debet)		2.411.274.266
a. Penyetoran Jasa Glo TA 2015	308.721	
b. Penyelesaian Piutang PNBP Sewa	164.444.450	
c. Mutasi Tambah Pendapatan Diterima Dimuka TA 2016	2.246.521.095	
Saldo Pendapatan Operasional TA 2016		5.582.236.716

Beban Pegawai
Rp976.361.114.192,00

D.2 Beban Pegawai

Saldo Beban Pegawai Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing masing sebesar Rp976.361.114.192,00 dan Rp805.636.548.504,00.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2016	Realisasi s.d 31 Desember 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	87.286.238.571	83.670.973.115	4,32%
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	299.411.095.062	282.396.266.115	6,03%
Beban Honorarium	455.794.094.697	323.346.890.302	40,96%
Beban Lembur	6.057.937.060	6.546.675.900	-7,47%
Beban Tunjangan Khusus dan Pegawai Transito	127.811.748.802	109.675.743.072	16,54%
Jumlah	976.361.114.192	805.636.548.504	21,19%

Termasuk kedalam Beban Pegawai adalah Belanja Pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp69.379.416,00 yang merupakan Kekurangan Pembayaran Tunjangan Kinerja Periode Agustus sd Desember sebagai akibat perubahan grading pegawai.

Terdapat pengurangan beban pegawai yang diakibatkan adanya pengembalian Belanja Pegawai yang dilakukan setelah tanggal pelaporan, namun tetap dipertimbangkan dapat mempengaruhi laporan keuangan. Selain itu terdapat pengurangan beban tahun berjalan yang diakibatkan adanya pelunasan Belanja Pegawai yang masih harus dibayar Tahun Anggaran 2015. Rincian mutasi Beban Pegawai digambarkan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Pegawai (Netto) Tahun Anggaran 2016		976.361.114.192
Penyesuaian Debet		349.917.807
a. Pelunasan Kelebihan Tunkin melalui Potongan SPM	280.538.391	
b. Kekurangan Pembayaran Tunkin TA 2016	69.379.416	
Penyesuaian Kredit		404.783.670
a. Penyelesaian Utang Belanja Pegawai (Honor TA)	9.375.000	
b. Penyelesaian Utang Belanja Pegawai (Tunkin Pegawai)	71.600.379	
c. Kelebihan Pembayaran Uang Makan TA 2016	43.869.600	
d. Piutang Kelebihan Tunkin TA 2016	279.938.691	
Saldo Beban Pegawai TA 2016		976.361.114.192

Selain itu, terdapat pengeluaran yang karakteristiknya merupakan Beban Pegawai namun direalisasikan sebagai Beban Barang dan Jasa terdiri dari pembayaran Uang Representasi Pimpinan Fraksi sebesar Rp1.216.600.000,00 dan pembayaran Uang Komunikasi Intensif dan Penanganan Pengaduan Masyarakat sebesar Rp56.099.500.000,00.

Beban Persediaan
Rp31.032.111.631,00

D.3 Beban Persediaan

Saldo Beban Persediaan Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing masing sebesar Rp31.032.111.631,00 dan Rp27.405.207.882,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2016	Realisasi s.d 31 Desember 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan konsumsi	24.246.161.494	21.189.809.761	14,42%
Beban Persediaan bahan baku	131.838.410	178.756.315	-26,25%
Beban Persediaan Lainnya	6.654.111.727	6.036.641.806	10,23%
Jumlah	31.032.111.631	27.405.207.882	13,23%

Seluruh beban persediaan yang tercatat pada Laporan Keuangan ini, merupakan hasil kiriman aplikasi SIMAK-BMN, sesuai dengan laporan pemakaian persediaan yang dilaporkan oleh unit kerja pengelola persediaan.

Beban Barang dan Jasa
Rp1.737.346.211.334,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Saldo Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing masing sebesar Rp1.737.346.211.334,00 dan Rp1.674.132.908.170,00.

Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Munculnya beban aset ekstrakomptabel disebabkan adanya penggunaan akun belanja modal yang membentuk aset ekstrakomptabel (dibawah nilai kapitalisasi).

Rincian Beban Barang dan Jasa setelah koreksi disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2016	Realisasi s.d 31 Desember 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	1.513.832.446.178	1.467.648.616.425	3,15%
Beban barang Non Operasional	158.568.646.050	149.626.364.926	5,98%
Beban Jasa	64.881.734.720	56.734.010.932	14,36%
Beban Aset Ekstrakomptabel	63.384.386	123.915.887	-48,85%
Jumlah	1.737.346.211.334	1.674.132.908.170	3,78%

Saldo beban barang dan jasa untuk tahun anggaran 2016, berasal dari realisasi Belanja Barang dan Jasa setelah melalui penyesuaian penyesuaian yang diperlukan, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Barang/Jasa (Netto) Tahun Anggaran 2016		1.737.346.211.334
Penyesuaian Debet		655.851.152
a. Belanja Modal teridentifikasi sebagai Belanja Barang	574.598.375	
b. Belanja Persediaan teridentifikasi Belanja Barang	17.868.391	
c. Belanja Modal teridentifikasi ekstrakomptabel	63.384.386	
Penyesuaian Kredit		150.212.654
a. Pelunasan Utang Belanja Barang	67.972.654	
b. Pembentukan Honor menjadi BMN	82.240.000	
Saldo Beban Barang/Jasa TA 2016		1.737.346.211.334

Selain itu, terdapat Beban Barang dan Jasa yang karakteristiknya merupakan Beban Pegawai terdiri dari pembayaran Uang Representasi Pimpinan Fraksi sebesar Rp1.216.600.000,00 dan pembayaran Uang Komunikasi Intensif dan Penanganan Pengaduan Masyarakat sebesar Rp56.099.500.000,00.

Beban Pemeliharaan
Rp110.967.422.237,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Saldo Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2016 Nomor: NK-03/PB.6/2017 adalah masing masing sebesar Rp110.967.422.237,00 dan Rp105.149.930.540,00.

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan setelah koreksi disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2016	Realisasi s.d 31 Desember 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	44.809.762.762	37.306.609.420	20,11%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	15.900.309.183	16.396.727.200	-3,03%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.885.254.714	23.899.530.577	-4,24%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.691.581.935	21.713.807.906	9,11%
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	383.883.000	1.335.485.000	-71,26%
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	51.058.700	-100,00%
Beban Pemeliharaan Lainnya	251.993.500	447.830.000	-43,73%
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2.329.448.332	3.426.572.349	-32,02%
Beban Persediaan suku cadang	715.188.811	572.309.388	24,97%
Jumlah	110.967.422.237	105.149.930.540	5,53%

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, terdapat pengurangan pada Beban Pemeliharaan sebesar Rp2.607.630.410,00 yang disebabkan adanya belanja pemeliharaan yang teridentifikasi sebagai aset. Rincian perubahan pada Beban Pemeliharaan disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Pemeliharaan teridentifikasi sebagai Peralatan dan Mesin	(300.150.049)
2	Beban Pemeliharaan teridentifikasi sebagai Gedung dan Bangunan	(553.046.696)
3	Beban Pemeliharaan teridentifikasi sebagai Jalan dan Jembatan	(1.476.960.000)
4	Beban Pemeliharaan teridentifikasi sebagai Irigasi	(164.621.000)
5	Beban Pemeliharaan teridentifikasi sebagai Jaringan	(114.069.265)
6	Penambahan Beban Persediaan Bahan Untuk pemeliharaan (Koreksi Transfer Keluar)	660.000
7	Penambahan Beban Persediaan Suku Cadang (Koreksi Transfer Keluar)	556.600
	Total	(2.607.630.410)

Saldo Beban Pemeliharaan untuk Tahun Anggaran 2016, berasal dari realisasi belanja pemeliharaan setelah melalui penyesuaian penyesuaian yang diperlukan. Selain itu Beban Pemeliharaan juga meliputi pemakaian persediaan yang dimaksudkan untuk pemeliharaan, yaitu pemakaian atas suku cadang serta bahan untuk pemeliharaan. Rincian mutasi beban pemeliharaan disajikan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Pemeliharaan (Neto) Tahun Anggaran 2016		140.156.049.494
Penyesuaian Debet		3.681.634.853
a. Belanja Modal teridentifikasi sebagai Belanja Pemeliharaan	309.128.960	

b. Tunggakan Belanja Pemeliharaan TA 2016	327.868.750	
c. Beban Persediaan Suku Cadang	715.188.811	
d. Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	2.329.448.332	
Penyesuaian Kredit		2.870.262.110
a. Pelunasan Utang Belanja Pemeliharaan TA 2015	261.415.100	
b. Belanja Pemeliharaan teridentifikasi aset	2.608.847.010	
Saldo Beban Pemeliharaan TA 2016		110.967.422.237

Beban Perjalanan Dinas
Rp681.397.342.445,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Saldo Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing masing sebesar Rp681.397.342.445,00 dan Rp604.309.432.492,00.

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2016	Realisasi s.d 31 Desember 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	513.954.990.794	429.733.086.019	19,60%
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	167.442.351.651	174.576.346.473	-4,09%
Jumlah	681.397.342.445	604.309.432.492	12,76%

Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp17.559.710.861,00

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Saldo Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2016 Nomor: NK-03/PB.6/2017 adalah masing masing sebesar Rp17.559.710.861,00 dan Rp16.028.236.365,00.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, terdapat penambahan pada beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp45.375,00 yang disebabkan adanya koreksi pencatatan pada aplikasi persediaan. Sebelumnya transaksi tersebut dicatatkan sebagai transfer keluar pada aplikasi persediaan.

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat merupakan bagian dari komitmen dan akuntabilitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada masyarakat yang ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat. Beban tersebut terdiri atas penyerahan majalah dan buletin parlementaria, serta penyerahan souvenir kepada pelajar dan delegasi baik dalam negeri maupun luar negeri yang melakukan kunjungan ke gedung DPR RI.

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp158.295.862.680,00

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2016 Nomor: NK-03/PB.6/2017 adalah masing masing sebesar Rp158.295.862.680,00 dan Rp138.504.390.007,00.

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, terdapat penambahan pada beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp237.179.949,00 yang disebabkan adanya penambahan pada aset tetap akibat belanja pemeliharaan yang teridentifikasi sebagai aset. Rincian perubahan pada beban penyusutan dan amortisasi disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	42.804.952
2	Penambahan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.902.110
3	Penambahan Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	169.959.288
4	Penambahan Beban Penyusutan Irigasi	10.288.812
5	Penambahan Beban Penyusutan Jaringan	4.224.787
	Total	237.179.949

Rincian Beban Penyusutan setelah koreksi disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi s/d 31 Desember 2016	Realisasi s/d 31 Desember 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	116.412.803.059	110.799.579.972	5,07%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26.042.421.844	22.907.838.181	13,68%
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.128.531.041	4.359.314.474	-28,23%
Beban Amortisasi Software	2.609.441.434	-	100%
Beban Amortisasi Lisensi	105.912.344	-	100%
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi	9.996.752.958	437.657.380	2184,15%
Jumlah	158.295.862.680	138.504.390.007	14,29%

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp10.759.009,00

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2016 Nomor: NK-03/PB.6/2017 adalah masing masing sebesar Rp10.759.009,00 dan Rp13.843.207,00.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, terdapat penambahan pada beban penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp232.250,00 yang disebabkan adanya penambahan pada Piutang PNBPN yang merupakan piutang pemanfaatan BMN berupa warung sebesar Rp46.450.000,00 dengan kualitas lancar.

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
Rp4.215.753.562,00

D.10 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Saldo Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2016 Nomor: NK-03/PB.6/2017 adalah masing masing sebesar Rp4.215.753.562,00 dan Rp2.287.992.298,00.

Pos Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, terdapat pengurangan pada pendapatan non operasional sebesar Rp192.356.519,00 yang disebabkan adanya penghapusan pendapatan akibat ralat, serta reklasifikasi pendapatan dari pendapatan non operasional ke pendapatan operasional. Selain itu, terdapat koreksi atas transfer keluar yang menimbulkan pendapatan penyesuaian nilai persediaan. rincian koreksi pendapatan non operasional disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Pengurangan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	(1.200.000)
2	Reklasifikasi dari Penerimaan Kembali belanja modal TAYL ke Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemerintah	(173.000.000)
3	Reklasifikasi dari Penerimaan Kembali belanja barang TAYL ke Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemerintah	(18.262.339)
4	Penambahan Pendapatan Penyesuaian Nilai persediaan akibat koreksi transfer	105.820
	Total	(192.356.519)

Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional setelah koreksi disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2016	Realisasi s.d 31 Desember 2015	NAIK (TURUN) %
SURPLUS/DEFISIT DARI PELEPASAN ASET NON LANCAR	1.096.263.502	509.456.372	115,18%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	3.119.490.060	1.778.535.926	75,40%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	4.215.753.562	2.287.992.298	84,26%

Dalam Surplus dari pelepasan aset non lancar, telah termasuk Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp1.219.172.578,00 serta adanya Beban Kerugian Pelepasan Aset senilai Rp122.909.076,00.

Saldo Surplus dari kegiatan non operasional lainnya berisi pendapatan dari Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu. Pada TA 2016, dengan dikeluarkannya update terbaru pada Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA, dalam kegiatan non operasional lainnya telah diakui adanya Pendapatan Penyesuaian Nilai persediaan yang bersumber dari Koreksi Otomatis Persediaan sebagai akibat adanya selisih Harga Beli terakhir persediaan.

E. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp1.416.711.868.152,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing masing sebesar Rp1.416.711.868.152,00 dan Rp1.185.915.232.025,00.

Surplus (Defisit) LO -
Rp3.703.172.544.111,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Nilai Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2016 Nomor: NK-03/PB.6/2017 adalah masing masing sebesar -Rp3.703.172.544.111,00 dan -Rp3.365.474.902.305,00.

Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, terdapat pengurangan pada Surplus/Defisit LO sebesar Rp2.415.528.656,00 yang disebabkan adanya pengurangan beban yang cukup besar akibat adanya belanja barang yang diidentifikasi sebagai aset. Selain itu, terdapat penambahan Pendapatan Operasional serta penambahan beban Operasional. Rincian perubahan pada Surplus/Defisit LO disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
	Mutasi Tambah	
1	Mutasi Tambah Surplus/Defisit LO	(961.835)
2	Mutasi Kurang Surplus/Defisit LO	(2.608.847.010)
1	Mutasi Tambah Surplus/Defisit Non Operasional	105.820
2	Mutasi kurang Surplus/Defisit Non Operasional	192.462.339
	Mutasi Surplus/Defisit LO	2.415.528.656

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi Rp000,00

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp000,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing masing sebesar Rp0,00 dan Rp228.513.878,00.

Penyesuaian nilai aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp218.121.973,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Nilai koreksi persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing masing sebesar Rp218.121.973,00 dan Rp78.597.283,00.

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan	Koreksi
1	Barang Konsumsi	204.600
2	Bahan untuk pemeliharaan	155.399.973
3	Suku cadang	-
4	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	62.517.400
5	Bahan baku	-
6	Persediaan Lainnya	-
	Total	218.121.973

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi -
Rp4.170.350.649,00

E.4.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Nilai koreksi aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2016 Nomor: NK-03/PB.6/2017 adalah masing masing sebesar -Rp4.170.350.649,00 dan Rp5.003.917.871,00.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian koreksi aset tetap non revaluasi tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, terdapat penambahan pada Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp165.171.909,00 yang disebabkan Reklasifikasi Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) ke Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah. Reklasifikasi tersebut menyebabkan penambahan nilai gedung dan bangunan melalui menu koreksi nilai, yang kemudian mempengaruhi nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan. Rincian perubahan pada Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Koreksi Nilai Gedung dan bangunan akibat Reklasifikasi pendapatan	173.000.000
2	Penambahan Penyusutan melalui koreksi	(7.828.091)
3	Beban Pemeliharaan teridentifikasi sebagai Jalan dan Jembatan	165.171.909

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Aset Tetap	Debet	Kredit	Total
Peralatan dan Mesin	2.383.375.208	6.037.723.948	3.654.348.740
Gedung dan Bangunan	941.562.622	900.801.932	(40.760.690)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		3.672.681.039	3.672.681.039
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.529.051.379		(4.529.051.379)
Akumulasi Penyusutan Irigasi	65.372.243		(65.372.243)
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	12.655.517		(12.655.517)
Akumulasi Penyusutan Jaringan		39.656.976	39.656.976
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasi pemerintah	168.803.226		(168.803.226)
Beban Kerugian Pelepasan Aset		9.735.735.806	9.735.735.806
Total	78.100.820.195	20.386.699.701	12.285.779.506

Rincian Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi

Aset Tetap	Debet	Kredit	Total
Akumulasi Amortisasi Software	16.175.087.374	1.260.000	(16.173.827.374)
Akumulasi Amortisasi Lisensi	260.153.175	-	(260.153.175)
Total	16.435.240.549	1.260.000	(16.433.980.549)

Koreksi Lain-lain -
Rp001,00

E.4.4 Koreksi Lain-lain

Nilai koreksi lain lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing masing sebesar -Rp1,00 dan Rp57.907,00.

Koreksi lain lain merupakan koreksi lainnya selain koreksi atas pendapatan dan beban atas kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan.

Koreksi lain-lain pada tahun anggaran 2016 disebabkan adanya kekurangan penyeteroran pada Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Bendahara Penerimaan yang telah dicatat pada tahun anggaran 2015. Atas selisih tersebut, maka dilakukan koreksi atas saldo Kas di Bendahara Penerimaan dengan mendebet ekuitas

Transaksi Antar Entitas -
Rp3.689.363.710.253,00

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2016 Nomor: NK-03/PB.6/2017 adalah masing masing sebesar Rp3.689.363.710.253,00 dan Rp3.590.960.451.493,00.

Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

No	Uraian Akun	Koreksi
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	(3.699.126.643.200)
2	Diterima dari Entitas Lain	9.762.932.947
3	Transfer Keluar	-
4	Transfer Masuk	-
	Total	(3.689.363.710.253)

E.5.1 Ditagihkan Ke Entitas Lain / Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN)

Nilai Ditagihkan Ke Entitas Lain dan Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2016 Nomor: NK-03/PB.6/2017 adalah masing masing sebesar -Rp3.699.126.643.200,00 dan Rp9.762.932.947,00.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, terdapat pengurangan pada Diterima dari Entitas Lain sebesar Rp1.200.000,00 yang disebabkan adanya pengurangan pendapatan operasional berupa Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu. Pengurangan pendapatan tersebut dilakukan setelah proses ralat ke Satker Khusus Suspen Penerimaan telah selesai dilakukan pada bulan April 2017.

E.5.2 Transfer Masuk dan Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Nilai Transfer Masuk dan Transfer Keluar untuk periode yang berakhir pada 31

Desember 2016 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2016 Nomor: NK-03/PB.6/2017 adalah masing masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, terdapat pengurangan pada Transfer Keluar sebesar Rp11.273.515,00 yang disebabkan adanya perbaikan pencatatan pada aplikasi persediaan. Perbaikan meliputi penghapusan pencatatan ganda pada pemakaian dan transfer, serta perubahan penggunaan menu, dari sebelumnya menggunakan menu transfer, menjadi menu pemakaian. Seluruh dampak atas koreksi transfer keluar ini, telah diperbaiki pada akun yang terkait

Ekuitas Akhir
Rp1.398.950.805.617,00

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2016 Nomor: NK-03/PB.6/2017 adalah masing masing sebesar Rp1.398.950.805.617,00 dan Rp1.416.711.868.152,00.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, terdapat penambahan pada ekuitas akhir sebesar Rp2.593.174.080,00 yang diakibatkan adanya pengurangan defisit, penambahan koreksi nilai aset serta penambahan transaksi antar entitas disebabkan koreksi transfer keluar. Rincian penambahan ekuitas disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Mutasi pada Surplus/Defisit	(2.415.528.656)
2	Mutasi pada Koreksi Nilai Aset	(165.171.909)
3	Mutasi pada Transaksi Antar entitas	12.473.515
	Total	(2.593.174.080)

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141/TPA Tahun 2016 tentang Penunjukkan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPR RI, terdapat Penunjukkan Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Bapak Achmad Djuned, S.H.,M.Hum sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPR RI sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif Sekretaris Jenderal DPR RI. Penunjukkan ini mulai berlaku Per 1 Desember 2016 bersamaan dengan masa purnabakti Sekretaris Jenderal DPR RI, Ibu DR. Winantuningtyastiti S, M.Si.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, Bapak Achmad Djuned, S.H.M.Hum ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal DPR RI terhitung sejak 13 Maret 2017.

Lampiran I

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016

NO	Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2015	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016	Nilai Buku per 31 Desember 2016
A	Tanah		188.409.157.000	0	0	188.409.157.000
1	Tanah Persil		188.409.157.000	0	0	188.409.157.000
B	Peralatan dan Mesin		1.072.262.010.157	637.394.538.264	713.339.188.584	358.922.821.573
1	Alat Bantu	7	39.502.644.073	25.354.415.628	32.213.139.000	7.289.505.073
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	104.373.255.367	39.846.081.944	47.137.123.739	57.236.131.628
3	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	1.608.233.478	1.184.392.020	1.388.402.112	219.831.364
4	Alat Bengkel Bermesin	10	16.110.860.124	11.804.405.348	13.417.997.971	2.692.862.153
5	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	1.294.737.255	683.550.659	772.081.551	522.655.704
6	Alat Ukur	5	1.144.209.822	651.570.646	783.505.159	360.704.663
7	Alat Pengolahan	4	2.107.773.973	675.331.256	1.099.497.729	1.008.276.244
8	Alat Kantor	5	192.928.323.057	132.576.899.858	142.731.114.390	50.197.208.667
9	Alat Rumah Tangga	5	366.411.491.015	258.615.300.343	267.781.718.716	98.629.772.299
10	Alat Studio	5	102.360.304.640	33.350.195.578	49.162.485.747	53.197.818.893
11	Alat Komunikasi	5	17.169.921.075	12.309.232.972	13.463.487.214	3.706.433.861
12	Peralatan Pemancar	10	13.778.541.196	4.253.187.138	5.411.755.932	8.366.785.264
13	Peralatan Komunikasi Navigasi	15	97.900.000	22.843.380	29.369.920	68.530.080
14	Alat Kedokteran	5	14.540.538.317	6.099.422.172	7.680.845.524	6.859.692.793
15	Alat Kesehatan Umum	5	9.831.008.000	3.960.779.294	6.467.226.899	3.363.781.101
16	Unit Alat laboratorium	8	10.205.174.566	6.632.277.281	7.702.459.309	2.502.715.257
17	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	5.027.935.888	1.929.134.917	2.308.398.599	2.719.537.289
18	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	3.853.839.376	1.831.226.688	2.181.893.846	1.671.945.530
19	Alat Proteksi Radiasi /Proteksi Lingkungan	10	202.883.792	92.122.788	112.410.902	90.472.890
20	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	10	977.020.000	928.169.000	977.020.000	0
21	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	1.996.361.500	1.344.359.358	1.485.160.213	211.201.287
22	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15	5.071.024.467	1.828.177.798	2.152.723.186	2.918.301.281
23	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	10	180.259.612	11.052.373	29.078.321	151.181.291
24	Senjata Api	10	229.998.200	204.998.290	223.248.200	6.750.000
25	Persenjataan Non Senjata Api	3	804.822.547	473.981.240	606.095.779	198.726.768
26	Alat Khusus Kepolisian	4	935.148.582	63.977.781	226.651.830	708.496.952
27	Komputer Unit	4	70.252.778.031	48.502.641.845	52.573.438.361	17.679.341.670
28	Peralatan Komputer	4	71.339.572.902	38.486.602.180	47.843.594.893	23.495.978.009
29	Alat Eksplorasi Topografi	5	3.025.000	2.722.500	3.025.000	0
30	Alat Eksplorasi Geofisika	10	1.119.237.626	317.139.709	429.063.455	690.174.171
31	Pengolahan dan Pemurnian	15	103.485.000	95.151.000	97.188.198	6.296.802
32	Alat Pelindung	5	2.242.820.000	0	278.878.096	1.963.941.904
33	Alat SAR	2	454.841.240	106.343.390	294.694.609	160.146.631
34	Alat Kerja Penerbangan		10.271.713.101	381.652.711	1.277.783.571	8.993.929.530
35	Unit Peralatan Proses /Produksi	8	823.329.692	155.251.710	271.139.625	552.190.067
36	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7	2.000.135.145	1.626.465.169	1.696.439.187	303.695.958
37	Peralatan Olahraga	3	1.206.862.500	993.492.300	1.029.054.001	177.808.499
C	Gedung dan Bangunan		873.598.003.274	104.983.031.382	135.554.504.605	737.870.766.041
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	819.955.508.501	98.206.248.882	127.452.344.332	692.503.162.169
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	43.284.780.679	6.137.292.667	7.256.192.888	36.028.587.991
3	Tugu/Tanda Batas	50	10.184.983.466	639.491.833	845.967.586	9.339.015.881
D	Jalan, Irigasi dan Jaringan		80.700.987.120	28.911.458.885	32.078.360.710	48.622.626.410
1	Jalan	10	21.643.856.349	14.769.594.148	15.886.014.229	5.757.842.120

Lampiran I

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016

NO	Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2015	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016	Nilai Buku per 31 Desember 2016
2	Jembatan	50	2.411.364.980	265.250.150	313.477.442	2.097.887.538
3	Bangunan Air Irigasi	50	663.830.000	54.944.460	68.221.058	595.608.942
4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50	1.269.391.110	148.100.394	183.803.867	1.085.787.243
5	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	50	1.123.822.450	124.476.068	224.216.973	899.605.477
6	Bangunan Air Bersih/Air Baku		174.800.000	0	2.185.000	172.615.000
7	Bangunan Air Kotor	50	1.321.954.000	205.763.508	301.335.315	1.020.618.885
8	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30	6.607.961.009	1.491.307.130	1.741.455.208	4.866.505.801
9	Instalasi Air Kotor	30	8.512.069.367	1.782.311.892	2.092.722.340	6.419.347.027
10	Instalasi Pembangkit Listrik	40	3.892.424.000	725.706.168	844.738.818	3.047.685.182
11	Instalasi Gardu Listrik	40	5.455.441.800	658.470.450	811.114.036	4.844.327.764
12	Instalasi Pengaman	20	746.238.281	205.215.523	242.527.432	503.710.829
13	Instalasi Lain	5	6.511.360.954	5.394.917.904	5.722.818.300	788.742.854
14	Jaringan Air Minum	30	475.088.000	134.608.261	150.444.531	324.643.469
15	Jaringan Listrik	40	18.124.276.342	2.559.288.813	3.021.545.493	15.102.730.849
16	Jaringan Telepon	20	1.718.901.228	368.248.641	466.518.492	1.252.384.736
17	Jaringan Gas		48.207.270	3.255.375	6.624.176	42.583.094
E	Aset Tetap Lainnya		4.037.362.849	0	0	4.037.362.849
1	Bahan Perpustakaan Tercetak		3.646.978.149	0	0	3.646.978.149
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan bentuk mikro		1.863.000	0	0	1.863.000
3	Kartografi, naskah dan lukisan		56.551.000	0	0	56.551.000
4	Barang Bercorak Kesenian		81.185.700	0	0	81.185.700
5	Alat Bercorak Kebudayaan		250.985.000	0	0	250.985.000
F	ASET TAK BERWUJUD		37.876.312.745	0	18.414.853.441	19.461.459.304
1	Software		24.685.345.582	0	13.069.363.691	6.615.981.891
2	Lisensi		1.187.684.600	0	345.489.750	842.194.850
3	Hasil Kajian/Penelitian		9.499.779.000	0	0	9.499.779.000
4	Aset Tak Berwujud Lainnya		2.503.503.563	0	0	2.503.503.563
F	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan		12.750.015.644	2.770.491.027	3.546.257.475	9.203.758.169
1	Alat Angkutan Darat Bermotor		290.945.128	297.541.928	290.945.128	0
2	Alat Kantor		112.024.504	106.690.455	112.024.504	0
3	Alat Studio		395.175.000	0	395.175.000	0
4	Bangunan Gedung Tempat Kerja		3.173.124.912	472.803.586	549.097.565	2.624.027.347
5	Bangunan Gedung Tempat Tinggal		8.778.746.100	1.893.455.058	2.199.015.278	6.579.730.822
	Jumlah		2.219.007.520.400	771.289.028.531	880.972.053.899	1.337.862.733.873

Lampiran II : Tabel Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIDP)

No	KIDP	Satker	No/Kontak	Nilai/Kontak	%/PmMes	Nilai/KIDP	Sumber Dana
1	Peralatan dan Mesin	001012	-	35.661.000	0%	35.661.000	Rupiah Murni
2	Peralatan dan Mesin	001012	-	13.370.000	100%	-	Rupiah Murni
3	Peralatan dan Mesin	001012	-	7.980.000	100%	-	Rupiah Murni
4	Peralatan dan Mesin	001012	-	7.980.000	100%	-	Rupiah Murni
5	Peralatan dan Mesin	001012	-	6.880.000	100%	-	Rupiah Murni
6	Peralatan dan Mesin	001012	-	68.501.440.500	100%	-	Rupiah Murni
7	Peralatan dan Mesin	001012	-	43.930.000	100%	-	Rupiah Murni
8	Peralatan dan Mesin	001012	-	3.685.130.000	100%	-	Rupiah Murni
9	Peralatan dan Mesin	001012	-	3.099.048.291	100%	-	Rupiah Murni
10	Gedung dan Bangunan	001012	-	36.388.000	0%	36.388.000	Rupiah Murni
11	Gedung dan Bangunan	001012	-	66.422.400	0%	66.422.400	Rupiah Murni
12	Gedung dan Bangunan	001012	-	32.912.000	0%	32.912.000	Rupiah Murni
13	Gedung dan Bangunan	001012	-	46.593.000	0%	46.593.000	Rupiah Murni
14	Gedung dan Bangunan	001012	-	29.191.000	0%	29.191.000	Rupiah Murni
15	Gedung dan Bangunan	001012	-	46.532.000	0%	46.532.000	Rupiah Murni
16	Gedung dan Bangunan	001012	-	11.080.204.860	100%	-	Rupiah Murni
17	Jalan, Irigasi dan Jaringan	001012	-	36.212.000	0%	36.212.000	Rupiah Murni